KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA: STUDI TENTANG PERDEBATAN IDEOLOGI DI KALANGAN GENERASI MILENIAL MELALUI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

ETIEK DWI KURNIAWATI

NIM: E21215060

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etiek Dwi Kurniawati

NIM : E21215060

Program : S-1

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Khilafah Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial

Dengan bersunggguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL

TGL 20

3EB49AFF466470528

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Etiek Dwi Kurniawati

NIM: E21215060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Etiek Dwi Kurniawati

NIM : E21215060

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : "Khilafah Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial"

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2019

Pembimbing 1,

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP. 197008132005011003

Pembimbing 2,

Dr. Ainur Rofiq Al-Amin, M. Ag
NIP. 19720625200501007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Etiek Dwi Kurniawati** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Suhermanto Ja'far, M. Hum
NIP. 196708201995031001

Sekretaris

Muchammad Helmi Umam, S. Ag, M. Hum
NIP. 197905042009011010

Penguji I

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP. 197008132005011003

Penguji II

Dr. Ainur Rofiq Al-Amin, M. Ag
NIP. 19720625200501007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Etiek Dwi Kurniawati
NIM : E21215060
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : etwinaetik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul: KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA: STUDI TENTANG PERDEBATAN IDEOLOGI DI KALANGAN GENERASI MILENIAL MELALUI MEDIA SOSIAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(ETIEK DWI K)
nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 17
2. Sumber Data 17
3. Metode Pengolahan Data 18
4. Validasi Data 18

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : KONSEP IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM DAN PANCASILA **20**

A. Definisi dan Sejarah Khilafah Islam 20

B. Definisi dan Sejarah Pancasila 26

C. Konsep Ideologi Antara Khilafah Islam dan Pancasila 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep Ideologi Khilafah Islam 36
2. Konsep Ideologi Pancasila 39

BAB III : PROBLEMATIKA IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MILENIAL 42

A. Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia 42
B. Peran Ideologi Khilafah Islam Dalam Pandangan HTI 47
C. Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila di Kalangan Generasi Milenial 52
D. Dilema Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila 56
E. Pengaruh Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila Di Media Sosial 60

BAB IV : ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DALAM KONTROVERSI IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA 65

A. Awal Munculnya Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila 65
B. Sistem Pemerintahan Khilafah Islam 69
C. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila 72
D. Kontroversi Khilafah Islam Versus Pancasila di Media Sosial Perspektif Analisis Wacana Kritis N. Fairclough 75

BAB V : PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1984 sampai 1997. Generasi ini adalah generasi di mana sudah tidak kehilangan zaman, serba instan, menggunakan game online sebagai ajang *e-sport* untuk kompetisi *game* masa kini, menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaannya, media sosial adalah dunia maya yang mereka minati sekarang. Media sosial adalah tempat untuk berbagi informasi dan alat komunikasi dari jarak dekat maupun jarak jauh, mendekatkan yang jauh, bisa juga menjauhkan yang dekat.

Media sosial masa kini yang banyak diminati oleh generasi milenial adalah instagram, twitter, dan facebook. Media sosial selain untuk alat komunikasi dan informasi bisa juga berdampak negatif bagi penggunanya apabila tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh penculikan, perampokan, fitnah, berita bohong (*hoax*). *Hoax* adalah sesuatu yang saat ini terdengar tidak asing di telinga masyarakat umum. *Hoax* adalah berita bohong yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri.[1] Maka berhati-hatilah jika ingin menggunakan media sosial untuk menggali infomasi jangan sampai terjebak dengan informasi yang disebarkan tanpa adanya pertanggungjawaban.

[1] Ravii Marwanidan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, ravii.staff.gunadarma.ac.id//publika... (Diakses pada hari Rabu, 14 Nopember 2018, pukul 08.45 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belakangan ini masyarakat di kalangan umum khususnya generasi milenial menggunakan fitur aplikasi seperti google dan google chrome sebagai pusat informasi karena di sana banyak menyuguhkan informasi dan berita, apabila tidak bisa meneliti lebih jelas lagi, berita dan informasi tersebut bisa menjerumuskan masyarakat umum terutama bagi generasi milenial karena generasi milenial adalah generasi yang paling rentan dalam menanggapi berita *hoax* di media sosial seperti berita yang sekarang marak diperbincangkan di media sosial adalah "Khilafah Islam versus Pancasila" di mana ada kelompok yang ingin mendirikan Khilafah di negara Indonesia dan menggantikan Pancasila menjadi Khilafah Islam di Indonesia, tentu hal itu membuat para masyarakat di Indonesia khususnya para generasi milenial terkejut akan hal itu.

Negara Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, berbagai macam agama, adat istiadat dan budaya tentu saling merangkul satu sama lain. Seperti yang tercantum pada burung garuda simbol bangsa Indonesia yang dibawahnya bertuliskan Bhineka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Indonesia ini sangat indah karena pulaunya yang terbentang luas dan masyarakatnya mempunyai agama yang dipercayai masing-masing pada setiap orang. Setiap pulau mempunyai berbagai macam suku, adat, dan budaya. Negara Indonesia ini walaupun berbeda tetapi saling merangkul dan hidup secara damai.

Dahulu masyarakat Indonesia sangat guyub dan rukun. Namun setelah ada konflik dari berbagai macam bidang mulai dari krisis moneter, sistem pemerintahan, pendidikan, sosial-politik, bahkan sampai meranah ke bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Dari sinilah agama bisa dibuat tolak ukur sebagai sistem politik. Agama saat ini disangkut pautkan dengan bidang politik mulai dari penegakan Khilafah Islamiyah di Indonesia, pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), bahkan sampai pada pilpres tahun ini yang dinamakan kubu nomor 1 (satu) petahana dan kubu nomor 2 (dua) oposisi. Dengan menggunakan narasi Islam yang berbeda yakni kubu nomor 1 (satu) sistem moderat-kultural sedangkan kubu nomor 2 (dua) sistem konservatif-ideologis[2] sama halnya Pancasila versus Khilafah Islam.

Berbicara mengenai Khilafah dan Pancasila. Pengertian dari Khilafah adalah sesuatu yang wajib ditaati, sesuatu yang pasti, keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengannya dan keislaman seseorang tidak kukuh kecuali di atasnya.[3] Sistem Khilafah adalah sistem pemerintahan yang khas, yaitu pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam segenap di berbagai penjuru dunia. Sistem Khilafah berbeda dengan sistem pemeritahan yang lain seperti monarchi (kerajaan), republik, kekaisaran, maupun federasi.[4] Sedangkan Pancasila menurut tata bahasa adalah lima dasar, panca berarti lima, sedangkan sila berarti dasar kesusilaan, kelima prinsip itu sebenarnya telah berurat-berakar dalam jiwa dan kalbu rakyat Indonesia sejak berabad-abad sebelumnya.[5] Pancasila merupakan kumpulan lima nilai

[2] https://m.detik.com, 18 Februari 2019, (Diakses pada hari Minggu, 12 Mei 2019).
[3] Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam, Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq*, (Mesir: Terj. Bahasa Indonesia, Erlangga, 2006), 85.
[4] Indra Utama Tanjung, "Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 1, (2018), 116.
[5] Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Bandung: Bima Aksara, 1988), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multidisiplin yang dijadikan acuan tingkah laku dalam bermasyarakat dan bernegara sebagai bangsa Indonesia yang mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kelima nilai yang terkandung dalam pancasila, (sila 1) adalah Ketuhanan, (sila 2) kemanusiaan, (sila 3) patriotisme, (sila 4) demokrasi, dan (sila 5) keadilan sosial. Pancasila dirumuskan menjadi lima poin sebagai dasar negara bukan tanpa alasan.[6] Karena dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara diharapkan semua warga negara Indonesia menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Negara Khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan generasi milenial, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahwa apabila negara Khilafah didirikan di Indonesia akan memberikan solusi yang menerpa umat Islam di Indonesia saat ini, akan tetapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa HTI bertentangan dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Apabila dilihat dari segi lingkungan di Indonesia, realitanya sulit untuk diterapkannya sistem pemerintahan Khilafah karena Khilafah hanya bisa diterapkan di negara yang kental dengan agama Islam seperti di negara Timur Tengah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Arab dan identik dengan berpakaian gamis dan sorban dengan menggunakan bahasa Arab setiap harinya. Sedangkan di Indonesia adalah negara yang berbagai macam suku, adat, budaya, dan agama.

[6] Eko .A Meinarno dan Mashoedi, "Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/JIPPK*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dalam segala aspek lingkungan kehidupan berwaganegara walaupun terkadang terjadi konflik yang bernuansa agama baik secara fisik maupun ideologis melalui media sosial. Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya yang mempunyai nilai-nilai dalam hidup berkebangsaan, tidak hanya itu Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang mampu menyatukan bangsa Indonesia.

Pancasila sering dipandang sebagai ideologi yang umum seperti halnya kapitalisme dan liberalisme, yang menganggap bangsanya cerdas, pantang menyerah, mempunyai cita-cita tinggi dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di penjuru dunia, tidak hanya itu Pancasila juga mempunyai landasan sebagai pedoman hidup berwarganegara. Jika ada pihak yang menginginkan sistem pemerintahan Khilafah di Indonesia yang menganut syari'ah Islam, mereka belum tahu bahwa Pancasila mengandung makna di dalamnya yang terdapat nilai agamanya terutama pada sila pertama. Perlu diketahui bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mengandung sistem nilai syari'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[7]

Perdebatan antara Khilafah Islam versus Pancasila di berbagai media sosial dari dulu sudah menjadi perdebatan di kalangan generasi milenial, semenjak pilpres tahun 2019 hal itu semakin marak dan menjadi-jadi membuat para generasi milenial semakin ingin mencari tahu dan memberikan kebenaran bagi yang membela Khilafah islam maupun memberi kebenaran bagi yang

[7] Zakiyuddin Baidhawy, "Negara Pancasila Negara Syari'ah", *Jurnal Maarif*, Vol. 10, No. 1, (Agustus 2015), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membela Pancasila, ada juga yang mengambil jalan tengahnya yaitu saling mendamaikan supaya perdebatan ini tidak berlanjut sampai pada permusuhan bahkan perpecahan. Adapun untuk menanggapi isu yang terjadi di Indonesia tersebut adalah dengan menggunakan analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis digunakan untuk memecahkan beberapa masalah, diantaranya: yang *pertama*, semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial, maka menuntut pendekatan lintas-ilmu, *kedua*, keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik data semiotik (tulisan, visual, maupun lisan), dan yang *ketiga*, selalu reflektif dalam proses penelitian, yang artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti.[8] Dilihat dari perkembangan analisis wacana kritis terletak dalam membantu melihat ideologi bukan sebagai sesuatu yang abstrak, namun sebagai bagian dari kegiatan yang konkret atau praksis sosial. Ideologi dipandang sebagai subjek sosial, begitulah cara orang-orang memposisikannya.[9]

Analisis wacana kritis menganalisis sebuah peristiwa dengan memperhatikan apakah kejadian itu mempertahankan struktur sosial yang ada, mengubahnya atau memperbaikinya. Analisis wacana kritis ini mencari solusi dan mencari jalan keluar dari manipulasi dan masyarakat yang penuh dengan konflik. Masalah sosial itu karena ketidakbijaksanaan dan penyalahgunaan bahasa atau bentuk lain dari komunikasi. Analisis wacana kritis digunakan

[8] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1.
[9] Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengasah instrumen dan meningkatakan kesadaran serta menunjukkan arah perubahan.[10]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di kalangan generasi milenial melalui media sosial?
2. Bagaimana muatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di media sosial?
3. Bagaimana alur pemaknaan perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila secara filosofis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di kalangan generasi millenial melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui muatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di media sosial.
3. Untuk mengetahui alur pemaknaan perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila secara filosofis.

[10] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan solusi yang baik dan benar terkait isu-isu tentang perdebatan Khilafah Islam versus Pancasila yang beredar di media sosial. Khilafah Islam versus Pancasila menjadi sebuah perdebatan sejak dari dulu, akan tetapi perdebatan itu semakin menjadi-jadi di saat pilpres tahun 2019. Perdebatan tersebut terjadi di kalangan generasi milenial karena isu-isu yang bereder tentang Khilafah Islam versus Pancasila terdapat di berbagai media sosial mulai dari facebook, twitter, dan instagram.

Apabila dilihat sepintas, hal yang menyangkut tentang perdebatan Khilafah Islam versus Pancasila merupakan hal sepele karena hanya argumen-argumen penyebar fitnah dan berita bohong namun jika dilihat secara garis besar, argumen tersebut bisa menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti karena Khilafah Islam versus Pancasila menyangkut ideologi dasar negara Indonesia. Apabila diteliti dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough semakin menarik.

Sebagai mahasiswa yang haus akan informasi dan ilmu apabila menemukan informasi ataupun berita yang beredar di google apalagi di media sosial, jangan menelan berita atau informasi secara mentah-mentah karena tidak semuanya yang disebarluaskan di media sosial itu semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu saring terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu sebelum *sharing* demi perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dan menengahi perdebatan terkait Khilafah Islam versus Pancasila, penulis berharap semoga orang-orang yang biasa menyebar fitnah dan berita bohong (*hoax*) dapat berubah dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini dan teliti informasi tersebut sebelum disebarkan ke orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang hampir relevan dengan tema yang penulis teliti, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosi Selly dengan judul skripsi *"Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir"*[11]

Dalam penelitian ini, Rosi membahas tentang Hizbut Tahrir memahami globalisasi secara dikotomis yang mempunyai arti bahwa di satu sisi, Hizbut Tahrir menerima globalisasi sebagai sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan datang seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Akan tetapi, di sisi lain, Hizbut Tahrir menolak

[11] Rosi Selly, "Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir", (Skripsi, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara ekstrim terhadap ide globalisasi yang berasal dari Barat, atau yang biasa disebut dengan "modernisasi atau *westernisasi*." Karena globalisasi merupakan uniformitas *fear, fun, food, fashion,* and *faith* oleh karena itu globalisasi akan membuat semua negara meniru gaya ala orang Barat dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Itulah yang dipahami oleh kelompok Hizbut Tahrir.

2. Selanjutnya adalah skripsi Azrul Hakim yang berjudul *"Konsep Pemerintahan dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdul Raziq)"*[12]

   Dalam Penelitian Azrul, ia membahasa tentang bentuk pemerintahan Khilafah lahir sebagai proses evolusi karena kebutuhan menjadi seorang pemimpin setelah wafatnya Rasulullah yang sangat mendesak. Maka dilakukanlah musyawarah mufakat untuk membai'at Abu Bakar Ash-Siddiq menjadi seorang Khalifah yang mempunyai tugas ganda, sebagai pemimpin agama serta pemimpin negara. Sebagaimana, tokoh Ali Abdul Raziq mempunyai pandangan tersendiri tentang konsep pemerintah dalam Khilafah. Beliau secara terang-terangan menentang dan meragukan eksistensinya dalam Islam.

3. Skripsi yang terakhir adalah milik Muhammad Arif Khudori dengan judul skripsi *"Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*[13]

---

[12] Azrul Hakim, "Sistem Pemerintahan Dalam Islam Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdul Raziq", (Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan Khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan dalam fiqih siyasah, tidak ada aturan kewajiban seorang muslim untuk mendirikan Khilafah dalam sistem pemerintahan dalam negaranya. Khilafah dalam fiqih siyasah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh *Khulafaur Rasyidin* waktu itu sedikit menyerupai sistem pemerintahan republik. Hal itu bisa dilihat dari suksesi kepemimpinannya secara dipilih. Ada dua sistem Khilafah, yakni khilafah berdasarkan *syura* dan monarki. Khilafah *syura* diterapkan pada masa *Khulafaur Rasyidin*, sedangkan Khilafah monarki diterapkan pada masa Bani Umayyah sampai pada Turki Utsmani.

F. Kerangka Teori

Belakangan ini perdebatan ideologi antara Khilafah Islam versus Pancasila semakin marak terjadi karena perbedaan pendapat. Penelitian ini membahas mengenai perdebatan ideologi tersebut karena di media sosial semakin banyak isu-isu tentang perdebatan antara negara Khilafah dan negara Pancasila. Sudah jelas perlu diketahui bahwa Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, lebih tepatnya pada saat pemilihan *Khulafaur Rasyidin.* Pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti beliau. Kisah tersebut terjadi di Arab Saudi yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

[13] Muhammad Arif Khudori, "Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia", (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun Pancasila adalah Ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila juga terdapat 5 (lima) sila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi Warga negara Indonesia. Walaupun penduduk di Indonesia 85% menganut agama Islam, akan tetapi menutup kemungkinan bahwa di Indonesia akan ditegakkan negara Khilafah karena sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, adat-istiadat, ras, suku, dan agama. Apabila Khilafah tetap ditegakkan di Indonesia bagaimana agama lain yang menganut agama selain Islam, seperti halnya agama Nasrani, Hindu, Budha, dan Tionghoa.

Dari penjelasan yang sudah peneliti bahas di atas sudah jelas bahwa walaupun ada kelompok yang telah antusias untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia, akan tetapi hal itu tidak mudah bagi negara Indonesia untuk mengganti dasar negara yang dahulu sudah dirintis oleh para pejuang dan pahlawan Indonesia yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

Ada di media sosial dari dulu yang selalu menjadi perdebatan yang semakin menjadi-jadi ketika pilpres 2019 kemarin yaitu antara Khilafah Islam versus Pancasila. Adapun di media sosial twitter dengan nama akun M. Ismail Yusanto @Ismail_yusanto mengatakan bahwa “Khilafah itu kan ajaran Islam. Kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan, dan menegakkan ajaran Islam. Nah, salahnya dimana coba?” Lalu ada yang berkomentar seperti ini George Van Mars @Kars104 “Ormasnya sudah dibubarkan, akan tetapi pentolannya masih bebas berkeliaran menghasut dan melawan bahkan ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbangkan pemerintah dengan mendukung 2019 GP. Ketidaktegasan pemerintah menjadi bumerang."

Dari situlah peneliti ingin memberikan solusi atas masalah yang terjadi tentang perdebatan ideologi negara Indonesia. Pertama jika kita melihat negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, beribu-ribu pulau juga beraneka ragam suku, budaya, adat-istiadat dan agama. Jika Khilafah di tegakkan di Indonesia bagaimana letak keadilan yang beragam selain muslim? Tentu itu akan menjadi sebuah polemik di kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah dijelaskan bahwa Khilafah hanya bisa ditegakkan di negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi yang notabene adalah penduduk yang asli orang Arab. Peneliti juga perlu adanya analisis wacana kritis yang dibawakan oleh Fairclough.

Ada 4 (empat) langkah metode analisis wacana kritis yang ditawarkan oleh Fairclough, diantaranya yang *pertama*, memfokuskan pada aspek semiotiknya. *Kedua*, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial itu. *Ketiga*, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut. *Keempat* ialah mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.[14]

Peneliti memakai analisis wacana kritis dengan pendekatan multidisiplin karena berbagai macam aspek objek kajian yang beredar di media sosial. Sikap

[14] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritis yang harus dilakukan oleh peneliti adalah memiliki komitmen sosio-politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.[15]

Penjelasan di atas dapat membantu penulisan ini dalam menganalisis konflik tentang perdebatan ideologi antara Khilafah Islam versus Pancasila di media sosial yang terjadi baru-baru ini. Pembahasan pada penelitian ini adalah tentang politik. Apabila berbicara politik, tidak jauh dari unsur kepentingan pribadi, dari kepentingan bisa meranah pada konflik.

Habermas telah meletakkan kategori antropologis sekaligus epistemologis bagi kritik ideologi. Hubungan dialektis kedua kategori itu bersifat kritis karena menghubungkan kehendak manusiawi dengan pengetahuannya. Konsep yang mampu menampung hubungan itu adalah "kepentingan" rasio. Dalam bahasa Latin, kepentingan adalah *inter-ese* yang artinya berada di antara kutub empiris dan transendental. Kutub empiris berkaitan dengan kondisi sosio historis manusia konkret sebagai spesies yang bernaluri dan berkehendak, sedangkan kutub transendental bersangkutan dengan pengetahuannya yang bersifat normatif dan ideal. Kritik ideologi bekerja dalam dua tataran ini untuk mencari pertautan dialektis keduanya, yaitu manakala pemikiran terjadi karena pemikiran pembekuan masyarakat pada salah satu kutub. Pembekuan pemikiran terjadi karena subjek tidak menyadari kepentingan yang sesungguhnya dari rasio itu sendiri, yaitu kepentingan untuk membebaskan diri dari alam ataupun dari konflik sosial. Seperti alam

[15] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, kritik ideologi bekerja menjernihkan kembali kepentingan emansipatoris itu berdasarkan kepentingan itu sendiri.[16]

Kajian teori dalam penulisan ini menggunakan analisis wacana kritis yang bisa menganalisis interaksi sosial seperti organisasi, kelompok, sosial, proses sosial politik. analisis wacana kritis ini menjelaskan dan menjabarkan persinggungan antara lokal dan global, serta struktur wacana dan struktur masyarakat.[17]

Asumsi analisis wacana kritis tidak hanya membahas tentang bahasa, akan tetapi dibalik bahasa sudah ada ideologi. Bahasa dapat digunakan untuk instrumen kekuasaan. Fungsi dari analisis wacana kritis adalah menganalisa penggunaan bahasa, bagaimana bahasa itu digunakan. Dinamika dalam kehidupan masyarakat sehari-hari penuh dengan penyesatan sehingga bahasa itu dapat diangkat dan dianalisis dengan kritis.

Metode analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap dan mencairkan ideologi yang telah dibekukan dengan demikian bentuk-bentuk dominasi yang tidak adil, bentuk-bentuk ketidakberesan sosial bisa diungkap dan dikupas tuntas. Bentuk ketidakberesan sosial bisa berupa ketidaksetaraan, diskriminasi, perdebatan, bentuk-bentuk penindasan, dan juga prasangka-prasangka negatif itu diangkat sehingga degan demikian akan lebih jelas dan lebih transparan.[18]

---

[16] F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 214.
[17] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 23.
[18] https://youtu.be/ma3mt2DU54Q.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi dan berita yang dimuat di media sosial seperti facebook, chirpstory dan twitter mengandung unsur sara seperti diwajibkannya sistem pemerintahan Khilafah Islam di Indonesia padahal sudah jelas bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila juga mempunyai arti dan nilai-nilai sebagai pedoman berwarga negara. Akan tetapi ada golongan-golongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) antusias dalam menegakkan Khilafah Islam di Indonesia.

Komunikasi yang terjadi di media sosial bisa diteliti dengan menggunakan studi analisis wacana kritis dari Fairclough. Dimana praksis sosial-budaya dan teks dijembatani oleh praksis wacana tertentu. teks tersebut bisa ditafsirkan dalam arti bagaimana praksis wacana dapat ditarik dari tatanan wacana dan digabung dengan hakikat praksis sosio-budaya dimana wacana menjadi bagiannya.[19]

Analisis wacana kritis Fairclough ada 4 langkah. Langkah *pertama* adalah melihat dan mengidentifikasi ketidakberesan sosial di dalam suatu teks. *Kedua*, mencari hambatan-hambatan ketidakberesan sosial. *Ketiga*, ketidakberesan sosial dikehendaki oleh sruktur sosial. *Keempat*, membuka kemungkinan-kemungkinan pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut.[20]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian alat yang sangat tepat digunakan untuk menyusun sebuah penelitian. Penggunaan metode penelitian ini adalah untuk menghindari kemungkinan penyimpangan dan kesalahpahaman terkait objek material yang

[19] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 25.
[20] https://youtu.be/ma3mt2DU54Q.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis bahas sehingga data yang diperoleh harus benar-benar signifikan dan valid. Oleh karena itu metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *library research* atau penelitian kajian pustaka dengan pendekatan *deskripstif kualitatif* yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan referensi dan sumber data yang tertulis.

2. Sumber data

   Dalam proses pencarian data peneliti mengumpulkan dari berbagai sumber data yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sumber data tersebut dapat berupa website, artikel, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, buku, dan media sosial. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, diantaranya data primer dan data sekunder.

   a. Data Primer

      Sumber data primer merupakan sumber data yang proporsional untuk digunakan dalam penelitian ini. Mengingat judul skripsi ini adalah "Khilafah Islam Versus Pancasila: Studi Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial." Maka, Penulis menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial media, facebook, twitter, dan chirpstory sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber data primer, sumber data tersebut dapat berupa jurnal, buku, artikel, maupun skripsi yang berkaitan dengan teori analisis wacana kritis Fairclough, karena penulisan skripsi ini menghubungkan perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pada teknik pegolahan data ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, filosofis dan analisis wacana kritis. Adapun metode pengolahan data sebagai berikut:

a. Melakukan penulisan Khilafah Islam dan Pancasila secara historis dan filosofis serta menghubungkan Khilafah Islam dan Pancasila dengan menggunakan analisis wacana kritis.
b. Melakukan interpretasi atau menangkap makna atas data-data yang telah dianalisis oleh peneliti sebelumnya
c. Menuangkan hasil pembahasan ke dalam bentuk berupa laporan penelitian secara sistematis dan metodis.

4. Validasi Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan kriteria dan ditetapkan dengan tujuan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sangat jelas dari mana sumbernya. Sementara teknik pemeriksaan data, peneliti menggunakan cek plagiarisme dengan aplikasi *turnitin* guna membuktikan keaslian temuan data supaya tidak terjadi plagiasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini ada beberapa bagian, diantaranya:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Khilafah Islam dan Pancasila, yang meliputi: Definisi dan sejarah Khilafah Islam, Definisi dan Sejarah Pancasila, Konsep Ideologi antara Khilafah Islam dan Pancasila.

Bab ketiga, menjelaskan dan mendeskripsikan informasi tentang isu-isu perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila yang beredar di media sosial.

Bab keempat, menganalisis perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di kalangan generasi milenial melalui media sosial dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough

Bab kelima, ialah penutup, dimana dari bab-bab sebelumnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran bagi kemungkinan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya. Pada bagian yang terakhir dari penelitian ini adalah lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumentasi dalam mengambil data untuk penelitian ini juga terdapat daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP IDEOLOGI ANTARA KHILAFAH ISLAM DAN PANCASILA

A. Definisi dan Sejarah Khilafah Islam

Ada beberapa definisi atau pengertian dari Khilafah. Beberapa tokoh juga mendefinisikan Khilafah sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang Khilafah, peneliti terlebih dahulu akan menjabarkan definisi atau pengertian Khilafah dari berbagai tokoh. Khilafah Islam adalah sistem politik yang terbangun dari ideologi Islam, di dalamnya memuat aturan-aturan hukum Islam, pemerintah representatif, akuntabilitas masyarakat melalui mahkamah independen dan prinsip konsultasi representatif. Sistem pemerintahan Khilafah ini adalah pemerintahan yang dibangun di atas konsep kewarganegaraan tanpa melihat etnis, gender, dan kepercayaan yang sepenuhnya untuk menentang perlakuan represif terhadap kelompok religius dan etnis.[21] Maksud dari definisi Khilafah di atas adalah mampu menjadikan sistem pemerintahan yang menganut syari'at Islam dan mengutamakan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, sistem pemerintahan yang menganut hukum Islam dan memberikan solusi bagi permasalahan umat Islam saat ini, pemerintahan yang tidak memandang dari segi budaya, suku, dan ras.

Sedangkan menurut Ali Abdur Raziq, definisi Khilafah secara etimologi yang dipahami oleh umat Islam ialah sesuatu yang wajib ditaati, sesuatu yang

[21] Idil Akbar, "Khilafah Islamiyah; Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, (April 2017), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti, keimanan seseorang akan goyah kecuali dengannya dan keislaman seseorang tidak kukuh kecuali di atasnya.[22] Menurut pendapat Al-Baidhawi, Khilafah adalah statemen yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah SAW oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang sesuai syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang harus diikuti oleh umat Islam.[23] Tokoh berikutnya yang memberikan gagasannya mengenai Khilafah adalah Rakhmat S Labib menjelaskan Hadist tentang *Al-Khilafah 'ala' minhaj al-nubuwwah*: Istilah Khilafah berasal dari Rasulullah. Dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Ahmad yang memberitahukan periodisasi kepemimpinan umat Islam. Setelah masa *nubuwwah*, umat Islam akan mengalami era *al-Khilafah 'ala' minhaj al-nubuwwah*. Selanjutnya *mulk 'adud*, yang artinya kekuasaan yang menggigit. Kemudian *mulk jabariy*, yang artinya kekuasaan diktator, setelah itu berakhir, kemudian kembali lagi *al-khilafah 'ala' minhaj al-nubuwwah*. Ini tertuju pada sistem pemerintahannya.[24]

Dalam Al-Qur'an sudah tertulis bahwa janji suci Allah dan Rasulullah SAW tentang legilitas khilafah sebagai sesuatu sistem politik yang direstui seperti pada QS. An-Nur [24]: 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[22] Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam; Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq*, (Mesir: Terj. Bhs. Indonesia, Erlangga, 2009), 85.
[23] Azrul Hakim, "Konsep Pemerintahan Dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdur Raziq)", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 9.
[24] Muhammad Rikza Muqtada, "Hadis Khilafah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."

Definisi di atas dapat dipahami bahwa Khilafah Islam adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbasis Islam dan di dalamnya mengandung unsur aqidah, fiqih, dan syari'ah Islam. Khilafah Islam pertama kali dikenalkan oleh gerakan Islam Hizb al-Tahrir (HT). Dilihat dari sejarahnya, sistem pemerintahan Khilafah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya hingga tahun 1924.[25] Pada zaman Rasulullah SAW sudah terlihat sistem pemerintahan Islam pada waktu itu.

Allah SWT memberikan tugas kepada Rasulullah SAW sebagai Khalifah pertama di dunia Islam. Pada zaman Rasulullah SAW sudah terlihat jelas sistem pemerintahan Khilafah, karena dilihat dari lingkungan negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi yang mayoritasnya penganut agama Islam walaupun dahulu masih ada penduduk pengikut kaum Quraisy akan tetapi hal itu tidak membuat Rasulullah SAW menyerah dalam menghadapi tantangan untuk menegakkan agama Islam di sana karena amanah yang diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani tugasnya sebagai Nabi. Pada saat Rasulullah menjalankan tugasnya, selalu ada ujian yang datang yaitu yang menentang

[25] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul seperti kaum penyembah berhala, kaum kafir Quraisy. Pengorbanan Rasulullah yang sangat luar biasa itu selalu dalam lindungan Allah, walupun pada saat Rasul menjalankan tugas kenabiannya, Rasul pernah rahangnya patah, pelipisnya berdarah, lututnya berdarah hanya demi berjuang untuk melawan kaum kafir Quraisy yang selalu menghalangi jalannya Rasulullah saat beliau sedang berdakwah dan menjalankan amanah dari Allah, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan Rasulullah dalam menegakkan sistem pemerintahan Islam di sana dan mengajak kaum yang belum memeluk Islam menjadi kaum yang menganut agama Islam dengan cara berdakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dan tidak memaksa kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam karena Rasulullah SAW tidak ingin memaksakan kehendak orang lain.

Apabila kaum Quraisy ingin memeluk Islam dan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul sangat senang karena dakwahnya berhasil untuk mengajak orang-orang yang sebelumnya mengikuti jejak yang salah dengan menyembah berhala akhirnya berhasil mengajak kepada kebenaran yaitu menyembah Tuhan (Allah SWT). Hal itu yang membuat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.[26]

Sejarah dunia menyatakan bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan, pemimpin yang sederhana, berwibawa, tegas dan terutama pemimpin Islam yang bisa menjadi contoh dalam kepemimpinan di dunia. Hal ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yaitu *Khulafaur Rasyidin* diantaranya Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab,

[26] Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara; Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2015), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang semuanya bijaksana dalam memimpin.

Pada pertengahan Abad XIII M Baghdad mengalami kemerosotan yang luar biasa dan mengakibatkan runtuhnya di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, pendidikan dan sosial-politik. Saat itu bangsa Mongol menyerang kerajaan Islam di saat kerajaan Islam mengalami kejayaannya. Sebuah negara pasti ingin menjadi negara yang maju dan bisa mengatasi berbagai problematika umum dalam pemerintahan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 1928, Hasan Al-Banna mendirikan Khilafah Islamiyah yang pertama kalinya dengan mendirikan gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Didirikannya sistem pemerintahan Khilafah ini karena ingin mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh umat Islam saat itu, akan tetapi gerakan-gerakan tersebut dijauhi oleh negara-negara lain terutama di negara Islam karena dianggap sebagai gerakan radikalisme Islam. Namun Khilafah Islam saat ini sudah menyebar luas ke berbagai negara terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.[27]

Khilafah Islam diterapkan di negara-negara Islam terutama di Indonesia. Saat ini masih sangat marak dalam memperbincangkan Khilafah sebagai sistem pemerintahan di sini. Pembahasan tentang Khilafah pasti tidak asing ditelinga khalayak umum tentang HT (Hizb at-Tahrir). Hizb at-Tahrir (HT) yaitu Pemeran utama penegak Khilafah Islam di negara-negara yang berbasis Islam di seluruh dunia. Hizb at-Tahrir Tahrir (HT) didirikan pada tahun 1953, di *Al-*

[27] Indra Utama Tanjung, "Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, N0. 1, (2018), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quds Palestina.[28] Para penegak Khilafah Islam khususnya Hizb At-Tahrir (HT), Di Indonesia dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir (HT) masuk ke Indonesia pada tahun 1980 yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Baghdadi dan memperkenalkan namanya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2000. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan sasaran penting tegaknya Khilafah Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya konferensi Khilafah internasional pada 28 Mei 2000, kemudian dilanjutkan dengan konferensi kedua pada 12 Agustus 2007 dengan melalui surat terbuka, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajak presiden yang menjabat pada waktu itu ialah presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia.[29]

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat antusias untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia karena melihat lingkungan Ibu pertiwi ini mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, selebihnya adalah penganut agama non muslim, terhitung untuk saat ini penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam adalah 85%. Maka dari itu mereka ingin menguasai Indonesia dengan cara ditegakkannya Khilafah di negeri ini.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat ambisi untuk melakukan gerakan Khilafah Islam di Indonesia karena menurut mereka jika Khilafah Islam menjadi sistem pemerintahan di Indonesia dapat menjadi solusi atas jawaban dari masalah-masalah di Indonesia saat ini karena saat ini umat Islam

[28] Muhammad Rikza Muqtada, "Hadis Khilafah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), 4.
[29] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapkan pada sebuah masalah yang luar biasa. Supaya terhindar dari problematika sosial, solusinya adalah berislam dengan menjalankan Islam secara *kaffah*. Berislam secara *kaffah* adalah salah satu kewajiban dalam ajaran Islam karena mengandung makna mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan yang diajarkan. Baik dilihat dari hubungan manusia kepada Allah SWT *(hablumminallah)* maupun hubungan manusia dengan manusia *(hablumminannas)*. Termasuk juga dalam hal pemerintah seperti masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan tata cara bernegara.[30]

B. Definisi dan Sejarah Pancasila

Pembahasan mengenai istilah Pancasila pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama yaitu secara yuridis kenegaraan dan yang kedua ialah pembahasan secara ilmiah-filsafati, keduanya harus memenuhi persyaratan ilmiah, yang pertama harus memenuhi empat syarat ilmiah dan yang kedua mencakup pengetahuan ilmiah. Kedua persyaratan ini akan diuraikan secara singkat dan diimplikasikan terhadap Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.[31]

Pada dasarnya Pancasila merupakan sistem filsafat yang bersifat praktis. Artinya Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia supaya dapat

[30] Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2015), 204.
[31] Noor Ms. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun bathiniah.[32]

Pancasila ialah perumusan antara silang politik dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat direpresentasikan melalui pancasila sebagai hasil dari nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan dapat menjadi titik kunci dalam menguraikan kerumitan di berbagai bentuk kebangsaan. Pancasila harus dilandasi dengan elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai jiwa dan juga raga, pancasila adalah nafas sekaligus nyawa bagi bangsa Indonesia.

Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah ideologi negara ideal paripurna. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar lagi dan ia menjadi dasar negara yang absah. Sebagai sebuah pandangan hidup, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik jika direpresentasikan melalui Pancasila.[33]

Pancasila juga merupakan sistem kebudayaan yang artinya Pancasila harus menjadi bagian dari budaya pada setiap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melalui hasil karya cipta manusia dapat direpresentasikan diberbagai bidang baik dari segi agama, sosial-politik, budaya, juga etnis. Pancasila harus menjadi kegiatan kebudayaan, yaitu menjadi orientasi hidup dan tujuan berbangsa dan bernegara.[34]

---

[32] Noor. MS. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 35.
[33] Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama", *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No, 2, (2016), 176.
[34] Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama", *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No, 2, (2016), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam sila-sila tersebut mengandung makna tersendiri. Kelima nilai ini terkandung di dalam Pancasila di antaranya ialah

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan)

   Pada sila pertama, sudah jelas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Maka dari itu di Indonesia terdapat berbagai macam agama. Saat ini ada 6 (enam) agama yang dianut oleh bangsa Indonesia diantaranya agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu maka dari itu Indonesia adalah representasi dari nilai keragamaan agama. Dengan adanya beragam agama yang ada di Indonesia, toleransi merupakan tali penghubung yang paling penting dalam membangun kebangsaan yang adidaya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (Kemanusiaan)

   Prinsip sila yang kedua ialah mengenai humanisme, dimana sebagai bangsa yang baik harus mempunyai sifat yang adil dan mempunyai adab (tata krama). Saling menghargai sesama saudara sebangsa dan setanah air. Selain mementingkan agama pada sila pertama, di sila kedua juga mementingkan kemanusiaan karena hidup di dunia ini tidak mungkin hidup sendiri, pasti hidup secara berkelompok maka dari itu di sila kedua ditekankan untuk saling menghargai sesama saudara setanah air.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persatuan Indonesia (Patriotisme)

Pada sila ketiga ini juga saling menyambung antara sila pertama dan kedua. Dalam perihal agama, sejarah membuktikan bahwa agama memiliki peran penting dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara. Visi kebangsaan adalah misi dalam berpolitik, berbudaya dan beragama. Sebagai bangsa Indonesia yang baik harus bisa menjadi patriotisme bagi negara Indonesia, dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi untuk membangun negeri tercinta ini demi menjaga kedaulatan negara.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan (Demokrasi)

Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini merupakan visi dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan dan rakyat merupakan kedaulatan, maka dari itu rakyat merupakan tuan rumah di negara ini. Dalam membangun negeri ini adalah tugas bersama. Tidak boleh saling membeda-bedakan antara rakyat besar maupun rakyat kecil, semuanya sama yaitu sebagai warga negara Indonesia. Sendi kehidupan berbangsa diwujudkan dalam lintas agama dan budaya karena dengan melalui nilai-nilai dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia yang berkedaulatan, maju, dan demokratis. Itulah cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial).

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan visi yang mulia. Dalam agama juga sudah ditegaskan bahwa harus bisa berbuat adil sesama manusia terutama sesama bangsa Indonesia. Begitu juga dengan politik. Dengan adanya politik seharusnya bisa saling mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama dan politik seharusnya menjadi cermin berbangsa dan bernegara demi menjalankan visi kebangsaan dalam bingkai Pancasila. Tanpa agama, politik akan gagal dan tidak sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pancasila.[35]

Jauh sebelum Ir. Soekarno dan para pejuang kemerdekaan yang lain merumuskan pancasila, makna pancasila sudah terkandung di dalam kitab Sutasoma milik Mpu Tantular. Di dalam kitab tersebut merumuskan lima hukum karma, diantaranya tidak diperbolehkan bertindak kekerasan, tidak diperbolehkan mencuri. Tidak diperbolehkan berjiwa dengki, tidak diperbolehkan berbuat bohong, dan tidak diperbolehkan mabuk-mabukan dan minum-minuman keras.[36]

Pada awal pertumbuhan Pancasila terdapat para pejuang kemerdekaan Indonesia yang turut dalam merumuskan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara dengan melalui berbagai perenungan, pendapat, pemikiran, dan kesepakatan para tokoh kemerdekaan Indonesia. Dalam perumusan

[35] Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama", *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, (2016), 176-178.
[36] Eko A. Meinarno, dkk, "Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan ", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila yang akan dijadikan sebagai dasar negara perlu beberapa pemikiran, pendapat, gagasan dari bebarapa tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan tahap-tahap dalam merumuskannya juga tidak mudah, butuh perjuangan, kesabaran dan do'a supaya dalam perumusan Pancasila bisa berjalan dengan lancar.

Sejarah Indonesia menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Mei 1945 sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membahas masalah-masalah kemerdekaan Indonesia terutama membahas dalam masalah dasar negara. Sidang yang diselenggarakan ini telah dilakukan oleh beberapa tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan setiap tokoh berbeda-beda pendapat, akan tetapi mereka menempatkan semangat Ketuhanan atau Keagamaan dalam sila pertama yang terdapat pada dasar negara karena bagaimanapun juga agama adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.[37]

Dari beberapa tokoh yang ikut serta dalam perumusan Pancasila diantaranya yaitu, Ir. Soekarno menyebutkan bahwa dasar negara itu ada 5 (lima) sila:

a) Peri Kebangsaan
b) Peri Kemanusiaan
c) Peri Ketuhanan
d) Kerakyatan

[37] Moh. Dahlan, "Eksistensi Negara Pancasila Dalam Paradigma Ushul Fiqh", *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, (Februari 2013), 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Kesejahteraan Rakyat

Tokoh yang kedua ialah Muhammad Yamin mengemukakan usulan 5 sila dalam dasar negara:

a) Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Persatuan Indonesia
c) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[38]

Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberikan nama dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Pancasila tersebut telah memiliki rumusan prinsipil berupa:

a) Nasionalisme
b) Internasionalisme
c) Mufakat atau demokrasi
d) Kesejahteraan sosial
e) Ketuhanan Yang berkebudayaan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam forum rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI diantaranya Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Agus Salim, K. H. Wachid

[38] Moh. Dahlan, "Eksistensi Negara Pancasila Dalam Paradigma Ushul Fiqh", *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, (Februari 2013), 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasyim, A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abdul Kahar Muzakkar, Abikusno Tjokrosujoso, dan Muhammad Yamin. Para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia membuat kesepakatan dan keputusan untuk menjadikan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang tercantum dalam UUD 1945 dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang guna dalam rangka penetapan hukum dasar beserta pembukaannya. Dalam sidang tersebut beberapa dari pihak Indonesia bagian Timur keberatan dengan sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya". Karena tujuh kata tersebut lebih berpihak kepada pemeluk agama Islam, maka tujuh kata tersebut dihapuskan akhirnya diepakati pada sila pertama dasar negara Indonesia adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi kebijakan masyarakat Indonesia bersama.[39]

M. Amien Rais dan Hadimulyo sebagai tokoh Islam di Indonesia, berpendapat bahwa Pancasila adalah suatu ideologi Islam atau doktrin kenegaraan Islam versi Indonesia. Negara Indonesia ini mempunyai empat pilar negara diantaranya yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar tersebut dapat sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia karena hukum-hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, sistem politik, kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dicantumkan di sana yang menjadi konsensus kebangsaan

[39] Moh. Dahlan, "Eksistensi Negara Pancasila Dalam Paradigma Ushul Fiqh", *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, (Februari 2013), 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang final. Apabila dilihat dari makna Pancasila memang tidak hanya berbicara mengenai satu agama melainkan semua agama yang dianut di Indonesia maka dari itu Pancasila menganut sistem sekuler akan tetapi religius. Sila pertama pada Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah merefleksikan bahwa bangsa Indonesia secara umum sudah menjadi masyarakat yang religius. Kesadaran mereka terhadap Yang Maha Pencipta telah melekat pada hati dan diri masyarakat Indonesia sejak pertama kali dilahirkan di dunia hingga menjadi dewasa karena faktor keluarga dan lingkungan. Agama dipelihara dan dipupuk supaya bisa semakin tumbuh dan perkembang dalam kehidupan. Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya karena agama adalah pondasi yang sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa agama hidup ini akan kacau karena tidak pernah mengenal Tuhannya Yang Maha Pencipta. Sila pertama yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah kearifan yang merangkul keanekaragaman agama-agama. Pada tahap ini melukiskan titik temu agama-agama yang terdapat di Indonesia.[40]

Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah suatu konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Maka Pancasila tetap menjadi landasan konstitusi negara meskipun mengalami beberapa perubahan

[40] Zakiyuddin Baidhawy, "Negara Pancasila Negara Syari'ah", *Jurnal Ma'arif*, Vol. 10, No. 1, (Agustus 2015), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi. Hal ini bisa dilihat bahwa Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia. Sehingga perlu direnungkan, dengan merenungkan sesuatu adalah contoh kecil yang selalu dilakukan oleh Bapak proklamator yakni Ir. Soekarno. Beliau sering merenungkan nasib bangsa ini supaya menjadi bangsa yang hidup secara aman, damai, dan tentram. Dimaknai, memakni nilai-nilai Pancasila adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia khususnya para generasi saat ini, atau sebut saja dengan generasi milenial. Semua sekolah atau yayasan, para pelajar wajib mempelajari PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) karena jika Pancasila diajarkan sejak dini, para generasi saat ini bisa paham betul makna tentang Pancasila yang sesungguhnya dan yang terakhir diamalkan. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila perlu diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia terutama para generasi muda atau generasi milenial saat ini yang suau saat nanti akan menjadi penerus bangsa Indonesia. [41]

Salah satu tokoh politisi, akademisi maupun hakim di Indonesia yakni Mahfud MD mengatakan bahwa negara Pancasila merupakan negara yang konstitusional dan final. Bahkan secara hukum fikih dinyatakan sah dan benar. Para ulama' ushul fikih sudah menetapkan bahwa pilihan terhadap hukum yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan pilihan yang benar dan diakui secara syara'. Ssesuai dengan ijtihad para ulama'.[42]

C. Konsep Ideologi Antara Khilafah Islam dan Pancasila

[41] Cecep Supriadi, Relasi Islam dan Negara: "Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2015), 208-209.
[42] Moh. Dahlan, "Eksistensi Negara Pancasila dalam Paradigma Ushul Fiqih Progresif", *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, (Februari 2013), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep Ideologi Khilafah Islam

Fase yang pertama berawal pada 1372 H/1953 M oleh pendiri Hizb Al-Tahrir yakni Taqi Al-Din Al-Nabhani dengan membentuk dan membina generasi pertama dalam *halaqah-halaqah*. Secara individu mereka berkomunikasi dengan masyarakat melaui cara menyampaikan doktrin-doktrin dan ide-ide pemikiran Hizb Al-Tahrir. Siapa saja yang menerima doktrin dari pemikiran Hizb Al-Tahrir akan diajari secara intensif di halaqah-halaqah hingga mereka menyatu dengan ide-ide dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Hizb Al-Tahrir serta mempunyai pola pikir yang fanatik dengan Islam. Bahkan mereka mewajibkan mereka untuk bergabung dengan Hizb At-Tahrir.[43]

Apabila seseorang yang telah masuk dalam kelompok Hizb Al-Tahrir maka, dia akan mengikuti kemanapun Islam melangkah, dia akan mempunyai jiwa emosi yang Islami, rela terhadap apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, mempunyai jiwa fanatik yang kuat terhadap Islam, serta menolak semua hal yang membuat Allah dan Rasulnya murka. [44]

Hizb Al-Tahrir mengklaim pada fase pertama sebagai metode Rasul yang berpijak pada penjelasan dari Abu Ja'far Al-Thabari, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu:

(QS. Al-Muddaththir ([74]:1-3)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ

[43] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), 44.
[44] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُمْ فَأَنذِرْ

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Artinya: "*Wahai orang yang berkemul (berselimut),*
bangunlah lalu berilah peringatan,
dan Agungkanlah Tuhanmu."

Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT, kemudian Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam bukan dengan cara memaksa, namun dengan cara damai. Pada fase yang pertama, Rasul menyampaikan dakwahnya secara individu mengenai perintah Allah SWT. Rasulullah saat menyampaikan dakwahnya tidak secara terang-terangan karena banyak kaum Quraisy yang menentang Rasulullah, akan tetapi Rasulullah menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak kaum quraisy kembali kepada kebenaran dengan cara mematuhi peraturan Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Hizb at-Tahrir hanya fokus pada pembinaan *thaqafah* saja. Hizb at-Tahrir lebih kepada memperhatikan terbentuknya kerangka-kerangka gerakan, memperluas dan membina anggota secara berkelompok dalam *halaqah-halaqah* dan *thaqafah* yang telah diadopsi oleh Hizb at-Tahrir sampai pada keberhasilannya membentuk formulasi struktur partai yang terdiri dari orang-orang yang menyatu dengan Islam dan dapat berinteraksi dengan cara mengembangkannya di tengah-tengah umat.[45]

[45]Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hizb Al-Tahrir telah mengadopsi metodologi filosofisnya Marxisme-Leninisme. Al-Nabhani "menggambarkan prinsip-prinsip organisasi Marxisme-Leninisme, baik strategi maupun taktik, yang disatukan dengan *Islamist ideology* yang artinya *totalitarian organization* yang tidak mentoleransi perbedaan."[46]

Maka, tak jarang orang yang telah masuk dalam kelompok Hizb Al-Tahrir menghalalkan semua tentang Islam dan mengharamkan apa yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti contoh sistem Khilafah Islamiyah. Kelompok ini sangat antusias untuk menegakkan Khilafah Islam di negara Indonesia sebagai sistem pemerintahannya.

2. Konsep Ideologi Pancasila

Istilah ideologi banyak mengandung arti kata, yaitu perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagai persyaratannya serta harus dapat memenuhi teori-teori kebenaran dalam filsafat digunakan sebagai tolak ukur teologi yang tangguh, baik, komunis, liberalis, maupun Pancasila.[47]

Pancasila sebagai Ideologi negara merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana secara formal harfiah dirumuskan dalam bagian akhir

[46] Ibid,
[47] Noor. Ms. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi negara secara spekulatif dirumuskan oleh beberapa tokoh pejuang kemerdekaan RI serta para ulama'-ulama' di Indonesia pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI dan dilanjut dengan sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia, diharapkan kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pola pelaksanannya dipancarkan pada empat pokok pikiran yang koheren, komprehensif, dan mendalam, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan dijelmakan dalam pasal UUD 1945.[48]

Ideologi Pancasila adalah pencerminan suatu mayarakat yang mencita-citakan kebahagiaan dengan tata masyarakat baru yang adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, untuk menggantikan masyarakat dengan kondisi kemiskinan serta keterbelakangan warisan kolonialis. Pancasila dengan pokok-pokok pikiran yang utuh tercantum di dalam pembukaan dan dijelmakan dalam pasal UUD 1945, maka cukup terbukti kiranya untuk menkualifikasikan Pancasila sebagai "Manifesto Ideologi", bagi keberadaan bangsa Indonesia dalam bernegara.[49]

Pancasila sebagai ideologi yang dinamik maksudnya adalah kesatuan prinsip pengarahan yang berkembang dialektik serta terbuka penfsiran baru untuk melihat perspektif ke masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan berbangsa dan

[48] Noor. Ms. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 37.
[49] Ibid, 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara. Ideologi Pancasila sebagai dasar perkembangan keterbukaannya adalah hakikat kodrat manusia monopluralis, sehingga unsur moral menjadi landasan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.[50]

Sebagai ideologi yang seimbang, maka Pancasila sebagai dasar negara yang dinamik maupun ideologi terbuka hal itu akan menggambarkan sebagai ideologi yang seimbang dan harmonis demi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara ingin mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin seimbang antara individu dan sosialnya dengan menempatkan manusia sebagai individu yang mandiri dan religius sehingga setiap warga negara mencapai haknya untuk mendapatkan kehidupan yang adil, makmur, dan sentosa sesuai dengan hakikat manusia yang adil dan beradab.

Berdasarkan filsafat dan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia sangat menyadari akan kemajemukan agama, suku, etnis, ras, dan budaya yang merupakan bagian berbeda satu sama lain sesuai dengan "Bhineka Tunggal Ika" yang mempunyai arti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Namun demi kepentingan bersama untuk mewujudkan rakyat yang adil, makmur, dan sentosa keberagaman tersebut menjadi penguat sehingga terintegrasi secara nasional.[51]

---

[50] Noor. Ms. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 39.
[51] Satrijo Budiwibowo, "Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (April 2016), 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROBLEMATIKA IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MILENIAL

A. Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Ideologi berasal dari kata Yunani yakni *Idein* yang mempunyai makna melihat, atau *idea* yang artinya raut wajah, perawakan, gagasan, pendapat, hasil pikiran, dan *Logia* yang artinya ajaran. Dengan demikian arti dari ideologi adalah ajaran atau ilmu yang mengenai gagasan dan hasil pikiran dari seseorang (*sciense des ideas*).[52] Dalam kehidupan kenegaraan, ideologi dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan cara mendirikan negara, dalam hal ini biasa disebut dengan *philosofische Grondslag* (*Weltanschauung*) yang mempunyai arti pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negara untuk didirikan sebuah negara.[53]

Menurut pendapat seorang pakar ilmu politik yaitu Alfian, beliau mengemukakan bahwa kekuatan suatu ideologi tergantung pada 3 kualitas dimensi yang ada pada ideologi tersebut, diantaranya yang *pertama*, dimensi realita yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata dan berakar dalam atau hidup dalam masyarakat atau bangsanya,

[52] Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 57.
[53] Ibid, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman sejarahnya yang bisa menjadi jiwa bangsa. *Kedua*, dimensi idealisme yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik lagi melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan yaitu ideologi memiliki keluasan yang dapat merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Menurut pakar tentang ilmu politik ini, Pancasila masuk dalam kategori dimensi tersebut.[54]

> Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yaitu sistem tata nilai yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di berbagai bidang. Maka dari itu sifatnya yang harus terbuka, luwes, dan fleksibel. Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila telah memenuhi syarat di dalamnya sebagai ideologi terbuka terbukti Pancasila telah memenuhi tiga syarat dimensi di atas. Dalam pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar dari Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman.[55]

---

[54] Subandi Al-Marsudi, *Pancasila Dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 61.
[55] Ibid, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai berbangsa dan bernegara yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila di atas mengandung makna yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai di dalamnya yang terkandung secara tidak langsung merupakan hasil harmonisasi, kompromi indah antara kelompok muslim maupun non muslim yang menghendaki dasar Islam dengan kelompok nasionalis yang mengedepankan dasar kebangsaan Indonesia.[56]

Dalam diskusi sidang BPUPKI yang merumuskan Pancasila terdapat para pejuang dan para tokoh yang mewakili seluruh Indonesia. Para tokoh tersebut tidak hanya warga muslim saja melainkan juga warga non muslim. Pada waktu itu para pejuang tokoh kemerdekaan Indonesia bersatu dan menyelaraskan pendapatnya demi kemerdekaan dan keutuhan negara Indonesia. Hal ini secara tidak langsung merupakan hasil dialog yang menyejukkan antara minoritas dan mayoritas.[57]

[56] Ulya, "Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, (2016), 74.
[57] Ibid, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1

Simbol Pancasila terdapat pada burung garuda yang kakinya memegang erat tulisan Bhineka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua" sesuai dengan nilai-nilai yang tekandung di dalam Pancasila. Garuda Pancasila mempunyai simbol yang di dalamnya terdapat makna yang mungkin belum semua orang mengetahuinya. Penulis menyebutkan dan menjelaskan simbol-simbol tersebut.

Pada masing-masing sayap garuda jumlah bulunya terdapat 17 helai bulu, pada leher garuda terdapat 45 helai bulu, pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu, dan pada ekor terdapat 8 helai bulu yang melambangkan 17 Agustus 1945. Simbol bintang terdapat di tengah burung garuda, bintang dinyatakan sebagai nilai dari Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu sila pertama. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung makna bahwa berkat dan rahmat Tuhan adalah hal dari segalanya dan merupakan hubungan antara Tuhan dan manusia.[58]

Simbol rantai terdapat di kiri bawah, rantai adalah simbol kedua yakni Pancasila sila kedua yang artinya bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini mempunyai makna yaitu rantai ini nantinya akan terdiri dari mata rantai yang membentuk lingkaran dan berbentuk segi empat, dimana lingkaran adalah gambaran untuk perempuan dan segi empat adalah untuk laki-laki.[59]

Simbol pohon beringin terdapat di kiri atas burung garuda. Pohon beringin adalah simbol ketiga dari Pancasila sila ketiga yang mempunyai arti bahwa di mana pohon ini merupakan salah satu pohon besar yang diyakini banyak orang untuk sebuah tempat berlindung dan berteduh. Hal ini mempunyai makna persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah salah satu pohon yang unik dan memiliki sulur yang akan menjalar kemana saja menandakan keberagaman bangsa Indonesia.[60]

Simbol kepala banteng yang menjadi simbol sila ke empat pada Pancasila. kepala banteng ini terdapat di kanan atas. Simbol kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mempunyai makna apapun yang terjadi, rakyat Indonesia harus tetap berkumpul dan memberikan musyawarah secara adil dan akan mendiskusikan apapun secara bersama-sama atau

---

[58] https://guruppkn.com, *5 Urutan Lambang Garuda Pancasila dalam Simbol Budaya Indonesia*, (Dikutip pada Kamis, 27 Juni 2019, Pukul 19:31).
[59] https://gurupkn.com, *5 Urutan Lambang Garuda Pancasila dalam Simbol Budaya Indonesia*, (Dikutip pada hari Kamis, 27 Juni 2019, Pukul 19:43).
[60] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusyawarah secara adil dan akan mendiskusikan apapun secara bersama-sama atau bermusyawarah.[61]

Simbol padi dan kapas merupakan simbol sila ke-lima pada Pancasila yang terdapat di kanan bawah burung garuda mempunyai arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi adalah lambang dari makanan pokok yang berupa pangan dan kapas adalah kebutuhan untuk pakaian. Ini adalah hal yang diperlukan untuk kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia.[62]

Teknologi yang berkembang semakin pesat di kalangan muda generasi milenial, ideologi Pancasila sebagai simbol kebangsaan serta sebagai dasar negara Indonesia sangat memprihatinkan dikarenakan ada ideologi baru yang ingin masuk ke Indonesia. Ideologi ini dibawa oleh beberapa kelompok yang ambisius untuk menggeser Pancasila.

B. Peran Ideologi Khilafah Islam Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia

Khilafah adalah sebuah ideologi menurut Hizbut Tahrir Indonesia ialah suatu keyakinan atau akidah yang didasarkan pada rasionalitas untuk menghasilkan aturan-aturan bagi manusia. Bangunan nalar Khilafah diperkuat oleh suatu kontruksi Islam sebagai ideologi. Dalam hal ini, makna akidah yang didasarkan pada rasionalitas adalah pemikiran yang komprehensif dilihat dari kehidupan manusia, fenomena alam, tumbuhan dan hewan, alam semesta. Sedangkan aturan yang berasal dari akidah adalah berupaya memberikan solusi

[61] https://gurupkn.com, *5 Urutan Lambang Garuda Pancasila dalam Simbol Budaya Indonesia*, (Dikutip pada hari Kamis, 27 Juni 2019, Pukul 19:43).
[62] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memecahkan sebuah problem bagi kehidupan manusia di bumi ini seperti cara penyelesaian, penjagaan akidah serta penyebaran ideologi.[63]

Menurut Hizb At-Tahrir, ideologi yang sebenarnya adalah ideologi yang berdasarkan Islam. Mereka menegaskan bahwa ideologinya adalah Islam bahkan Islam merupakan harga mati bagi kelompok yang dipelopori oleh Taqiyuddin Al-Nabhani. Hal ini terlihat jelas pada visi dan misi yang menegaskan bahwa Hizb At-Tahrir berideologi Islam. Dalam kitab *Nidzam al-Islam* sebagai kitab pertama Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani menjabarkan ideologi yang ada di dunia ini, diantaranya adalah Kapitalisme, Sosialisme (Komunisme), dan Islam.[64]

Ideologi kapitalisme berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya sehingga lahirlah ide demokrasi serta kapitalis. Kapitalisme berdiri tegak atas dasar pemisahan agama dan sekularisme. Kedua ialah sosialisme (komunisme) memandang bahwa segala hal yang ada di dunia ini seperti manusia, alam semesta, dan kehidupan adalah materi. Materi ini menjadi asal dari semuanya yang ada di bumi ini. Terakhir adalah ideologi Islam. Ideologi Islam berbeda dengan kedua ideologi di atas karena Islam memandang bahwa dibalik alam semesta dan makhluk hidup terdapat Pencipta dari semua yang hidup yaitu Allah SWT.[65] Ideologi ini dipegang teguh oleh kalangan Hizb At-Tahrir hingga saat ini.

---

[63] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 116.
[64] Mohammad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)", *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), hal. 38.
[65] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khilafah merupakan bagian dari *mabda'* yang harus diwujudkan. Maka dari itu, tegaknya *al-dawlah al-islamiyah* bergantung pada *mabda'* Islam. *Mabda'* adalah sebutan lain dari ideologi, sebutan *mabda'* biasa digunakan oleh kalangan islamisme. *Mabda'* terdiri dari dua unsur yakni *fikrah* dan *thariqah*. *Fikrah* adalah solusi pemecahan terhadap problematika yang dihadapi oleh manusia, sedangkan *thariqah* adalah cara melaksanakan dan menjaga ideologi atau *mabda'* dan memaparkan bahwa ajaran Islam yang berisi tentang penjelasan mengenai cara-cara mengemban dakwah seperti penjelasan *Hizb At-Tahrir*.[66]

Khilafah sebagai ideologi Islam saat ini juga banyak yang mendukung bahwa salah satu jawaban dan solusi atas problematika atau masalah yang dihadapi seluruh manusia di bumi ini adalah dengan cara menegakkan Khilafah Islam sebagai sistem pemerintahan di negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya di negara Islam karena Khilafah Islam sudah sejak dari zaman Rasulullah sudah menjadikan Khilafah sebagai sistem kepemimpinannya bahkan juga sistem pemerintahannya.

Banyak yang beranggapan bahwa kelompok Hizbut Tahrir mengajak untuk menegakkan Khilafah adalah dengan cara memaksa, hal itu adalah ambisi dari para kelompok tersebut. Bisa dilihat bahwa Hizbut Tahrir membawa pada pemerintahan yang autokratik, yang artinya sistem pemerintahan dan kekuatan tertinggi yang terkonsentrasi pada

[66] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tangan seseorang. Artinya, pemerintahan yang dikendalikan oleh seseorang dengan seumur hidup.[67]

Segi utama dari autokrasi adalah sebagai berikut: pertama, banyak para autokrat yang mendasarkan peraturannya pada penghasutan rakyat, kedua, autokrasi sering melahirkan pada kekuatan dan pemaksaan, ketiga, kekuatan senjata menopang iautokrasi.[68]

Gambar 1.2

Membahas tentang Khilafah Islamiyah pasti tidak lupa dengan bendera Hizb at-Tahrir (HTI) yakni *al-liwa* dan *al-rayah*. *Al-liwa* bendera yang berwarna putih sedangkan *al-rayah* bendera yang berwarna hitam yang masing-masing bendera terdapat tulisan kalimat tauhid. Perbedaan *al-liwa* dan *al-rayah* adalah *al-liwa* menjadi pertanda posisi amir atau komandan pasukan dan turut beredar sesuai peredaran amir atau komandan pasukan, sedangkan *al-*

[67] Ainur Rofiq Al Amin, "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Autokratik", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2017), 471.
[68] Ibid, 472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rayah berada bersama para komandan bagian-bagian pasukan (skuadron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan yang lain).[69]

Motivasi Hizb At-Tahrir (HTI) dalam menegakkan Khilafah Islamiyah adalah atas dasar Al-Qur'an Surah An-Nur: 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."*

Bahkan mereka para kelompok HTI menjustifikasi bahwa dosa besar dan goyahnya akidah bagi yang mengingkari Khilafah. Dalam persepsi mereka hukum mengingkari Khilafah sama saja dengan orang yang mengingkari kewajiban shalat, zakat, haji, dan jihad.[70]

Pemimpin Hizb Tahrir Internasional yakni Abu Rashtah, beliau menghadiri acara Muktamar Ulama Nasional (MUN). Dalam sambutannya di Jakarta pada 21 Juli 2009 mengatakan bahwa tegaknya Khilafah bukan sekedar persoalan utama yang menjamin kemuliaan umat dan rahasia kekuatannya saja melainkan juga pertama dan terakhir dari berbagai yang lain. Hal serupa juga dinyatakan oleh Imran Wahid selaku juru bicara Hizb Al-Tahrir di Kerajaan

[69] Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia; Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi", *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2017), 181-182.
[70] Ibid, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inggris dalam konteks Khilafah sebagai ideologi alternatif dunia mengkritik thesis Fukuyama yang mensinyalir dunia telah berada pada *the end of history*, sebab tidak ada lagi ideologi alternatif yang aktif untuk menggantikan kapitalisme dan peradaban Barat. Imran Wahid ingin membuktikan bahwa pernyataan Fukuyama dalam thesisnya itu salah.[71]

C. Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila di Kalangan Generasi Milenial

Tantangan negara Indonesia saat ini adalah tentang globalisasi yang mana perkembangan zaman yang semakin pesat dapat menggeser ideologi bangsa Indonesia saat ini. Globalisasi saat ini telah masuk ke dalam berbagai aspek mulai dari aspek agama, ideologi bahkan sosial-politik. perkembangan agama di zaman teknologi saat ini semakin maju pesat karena pengaruh globalisasi.

Pada era globalisasi ini para generasi milenial semakin canggih dalam penggunaan telepon genggam (*smartphone*). *Smartphone* tersebut terdapat aplikasi yang dapat digunakan oleh beberapa kalangan masyarakat mulai dari kalangan muda, kalangan dewasa, hingga kalangan tua. Akan tetapi pengguna *smartphone* yang biasanya memakai fitur aplikasi media sosial adalah generasi milenial. Generasi milenial *(millennial generation)*, para ahli di bidang ini dapat menggolongkan generasi milenial berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980-

[71] Ainur Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1990 atau pada awal 2000, dan seterusnya.[72] Dari sini bisa dilihat bahwa generasi milenial atau anak remaja yang semakin tinggi peminatnya dalam hal *live streaming* video di aplikasi youtube. Teknologi yang semakin canggih saat ini membuat para generasi milenial mengandalkan internet dan media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan aplikasi yang sejenisnya sebagai tempat berbagi informasi dan hiburan di waktu senggang.

Saat ini media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Tren tersebut sudah terbukti di sepanjang tahun 2016 beberapa waktu lalu seperti aksi teror bom.[73] Masyarakat memang sudah beralih dari melihat berita di televisi dan membaca koran, akan tetapi saat ini berita sudah lebih dulu diberitakan melalui media sosial maupun di internet.

Dari penjelasan di atas, minat pengguna media sosial di kalangan generasi milenial atau para remaja sudah menyebar luas di Indonesia karena di internet saat ini khusunya di media sosial menyuguhkan banyak berita mulai dari berita zaman dahulu hingga zaman saat ini seperti berita tentang Khilafah Islam versus Pancasila.

Menurut pandangan Hizb at-Tahrir dalam (QS. Al-Maidah [5:48])

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

Artinya: *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."*

[72] https://www. Kominfo.go.id, *Mengenal Generasi Milennial*, (Dikutip pada Senin, 24 Juni 2019, pukul 21:05).
[73] Htpps://www.kominfo.go.id, *Mengenal Generasi Milennial*, (Dikutip pada Senin 24 Juni 2019, pukul 21:10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan (QS. Al-Maidah [5:49])

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya: *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu."*

Dari ayat di atas, Hizb at-Tahrir menjelaskan bahwa perintah kepada Nabi untuk memutuskan perkara umat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah mempunyai *mafhum* tentang keniscayaan hakim.[74] Umat Islam tidak boleh meninggalkan kebenaran dari apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Allah telah memperingatkan hamba-Nya untuk berhati-hati dari hawa nafsu.

Ayat kedua di atas telah menjelaskan bahwa hakim yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah Khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya yang digunakan adalah sistem Khilafah Islamiyah.[75] Hizbut Tahrir mempunyai konstitusi dan sistem politik yang siap untuk diterapkan. Sudah dijelaskan bahwa Hizbut Tahrir dan tokoh-tokohnya telah menyiapkan karya terkait dengan kebutuhan politik yang berupa kitab. Komitmen ini diikat sumpah setia. Sumpah ini disebut dengan *qasam*. *Qasamnya* adalah sebagai berikut "saya bersumpah atas nama Allah untuk menjadi penjaga dan pengaman Islam, selalu mentabanni (mengadopsi) pendapat Hizbut Tahrir, pemikirannya maupun

[74] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 121.
[75] Ibid, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undangnya secara lisan maupun perbuatan, selalu loyal terhadap kepemimpinannya, melaksanakan keputusan-keputusannya walaupun bertentangan dengan pendapat saya, mengerahkan segenap daya dan upaya dalam usaha mencapai tujuan, selama saya menjadi anggota."[76]

Dalam kitab *Nizham al-Hukm fi al-Islam* karya Abd Al-Qadim Zallum menyebut bahwa menurutnya dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang masalah hukum perang, pidana, kemasyarakatan, perdata, masyarakat madani dan sistem pemerintahan lainnya yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan *khulafaur Rasyidin*, dan para penguasa pemerintah setelahnya.[77]

Zallum juga menyatakan bahwa Islam mempunyai sistem pemerintahan kenegaraan. Islam tidak akan tegak tanpa suatu institusi negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Institusi politik yang bersifat basyariyyah, institusi yang khas, unik, dan berbeda dari sistem pemerintahan manapun di dunia dan isntitusi ini yang tak lain adalah *Dawlah al-Islamiyah* yang dipimpin oleh Khalifah.[78]

Pancasila adalah dasar negara Indonesia serta salah satu pilar kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila harus menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Penjabaran yang sesuai dengan keutuhan NKRI tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah

[76] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, (Wahid Foundation, 2019), 185.
[77] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 122.
[78] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[79]

Berdasarkan sila pertama pada Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap bangsa Indonesia dan seharusnya menjunjung tinggi agama yang mereka imani. Agama saat ini memang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan karena jika seseorang itu hidup tanpa agama pasti kehidupannya akan hancur berantakan. Apabila seseorang berpegang teguh pada agama yang diyakininya pasti orang itu bisa mengatur jalannya kehidupan, bisa mengendalikan emosi, dan bisa memerangi hawa nafsu jika agama yang diyakini memang sungguh-sungguh dibuat pedoman hidup.

D. Dilema Ideologi Antara Khilafah Islam Versus Pancasila

Terlihat secara jelas bahwa dari kelompok Hizb at-Tahrir (HTI) dan FPI (Front Pembela Islam) yang memunculkan aspirasi rasa syari'at Islam dalam

[79] UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila.[80] Hal ini muncul karena kekhawatiran kembalinya tuntutan Piagam Jakarta yang dulu pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Tampaknya mereka para HTI dan FPI ingin mengembalikan kembali syari'at Islam ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dengan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradap berdasarkan Pancasila adalah misi pertama yang berusaha menunjukkan sikap negara yang netral terhadap agama sesuai dengan keyakinan warga Indonesia. Penjelasan pada misi pertama menekankan kembali posisi hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Dewasa ini sering dijumpai maupun didengar bahwa Indonesia bukan negara atas dasar agama (teokrasi), bukan pula negara sekuler. Akan tetapi negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini menujukkan jika Indonesia hendak menegaskan sistem negara yang lebih moderat antara keterangan negara agama dan sekuler.[81]

Pada awal era modernisasi dimulai ada anggapan bahwa agama akan surut karena tantangan sekularisasi, namun yang terjadi justru sebaliknya sesuai dengan pengaruh globalisasi, agama saat ini semakin berjaya dengan terjadinya penambahan pengikut terutama pada agama-agama besar di dunia.[82]

---

[80] Alamsyah M. Dja'far, *Intoleransi; Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 5.
[81] Alamsyah M. Dja'far, *Intoleransi; Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 26.
[82] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka tak jarang bahwa agama saat ini dijadikan dalam urusan politik sebagai sistem pemerintahan yang baru.

Agama saat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, mulai dari tatanan sistem internasional, ancaman bagi prinsip dan aturan dalam hubungan internasional. Kebangkitan agama dalam bidang politik juga bisa dilihat dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia, seperti: PKS, PKB, PAN, PPP, dan PBB.[83] Untuk saat ini kekuatan partai politik yang berbasis Islam memang mempunyai pengaruh besar. Bisa dilihat juga pada tahun 2019 adalah tahun pilpres dimana ada dua pasangan calon capres dan cawapres yang sempat menjadi perbincangan warga negara Indonesia.

Khilafah Islam versus Pancasila semakin menjadi-jadi karena adanya pemilu 2019 yang diadakan pada bulan April 2019 lalu. Pada pilpres 2019 adalah petarungan dua narasi yang berbeda. Perbedaan dua kubu ini bisa dilihat dari beberapa bidang diantaranya ekonomi, agama, pendidikan terutama pada bidang politik. Kubu petahana yang menduduki Nomor 1 (satu) cenderung lebih mendekatkan diri pada kelompok Islam yang bercorak moderat-kultural. Kubu ini seringkali kampanye dan mendatangi beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' yang selama ini identik dengan ormas Islam dengan corak keislaman moderat dan ramah pada kulturural Indonesia. Bisa dilihat bahwa kubu petahana terakhir menghadiri acara dalam rangka memperingati hari lahir

[83] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimat, sayap organisasi keperempuan NU, di stadion Gelora Bung Karno beberapa bulan yang lalu.[84]

Sedangkan kubu oposisi yang menduduki Nomor 2 (dua) sering mengklaim bahwa dirinya sebagai kekuatan politik yang mempresentasikan perjuangan kelompok Islam. Klaim itu seolah mendapat dukungan dari ijtimak ulama GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) terhadap pasangan kubu oposisi. Kubu nomor 2 (dua) ini diusung oleh oposisi yang cenderung identik dengan kelompok Islam berhaluan konservatif. Sebagai contoh bahwa kubu nomor 2 (dua) yang mendekatkan dirinya pada Islam yang konservatif bisa dilihat dari kedatangan kubu nomor 2 (dua) datang pada acara reuni akbar 212 bulan lalu.

Sepak terjang dua kubu yang berbeda dalam memainkan sentimen keislaman menandai bahwa pilpres 2019 adalah pertarungan dua narasi keislaman. Di satu sisi kubu nomor 1 (satu) melibatkan Islam yang bercorak moderat-kultural sedangkan di sisi lain kubu nomor 2 (dua) melibatkan Islam yang berhaluan konservatif-ideologi. Pasangan kubu nomor 1 (satu) yang sepenuhnya didukung oleh NU mempresentasikan narasi keislaman yang cenderung moderat-kultural, sedangkan pasangan kubu nomor 2 (dua) yang berafiliasi dengan jaringan gerakan 212 mewakili narasi keislaman konservatif-ideologi.[85]

---

[84] https://m.detik.com>news>kolom, *Pilpres 2019 dan Dua Narasi Islam*-Detik News, (Dikutip pada Sabtu 22 Juni 2019, pukul 09:15).
[85] https://m.detik.com>news.kolom, *Pilpres 2019 dan Dua Narasi Islam*-Detik News, (Dikutip pada Sabtu, 22 Juni 2019, pukul 09:32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sebuah strategi politik, narasi keislaman konservatif-ideologi bisa terbilang relevan dengan fenomena konservatisme Islam yang mulai membara sejak awal reformasi hingga mencapai pucaknya hingga saat ini. Alhasil, seperti contoh yang bisa dilihat akhir-akhir ini semakin banyak isu-isu tentang Islam seperti isu pembakaran bendera HTI, Perppu Ormas, Pembubaran kelompok HTI, bahkan konflik Palestina-Israel potensial dipolitisasi yang bertemakan "bela islam", "bela ulama", dan sejenisnya. Akan tetapi, narasi keislaman yang berhaluan islam konservatif-ideologi ini cenderung tidak mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam moderat-kultural keindonesiaan, seperti Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan sejenisnya.[86]

Sedangkan kubu Nomor 1 (satu) yang disebut dengan petahana cenderung pada keislaman yang bercorak moderat-kultural. Pada kubu ini bisa dibilang dapat menarik simpati masyarakat Indonesia karena dilihat dari penduduk Islam di Indonesia merupakan Islam yang ajarannya terkenal dengan Islam moderat, sesuai dengan negara Indonesia. Penduduk Indonesia juga sangat akrab dengan kultural lokal. Akan tetapi, hal ini tentu mendapat penolakan dari golongan konservatif-ideologi.

E. Pengaruh Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila di Media Sosial

Digitalisasi agama seperti saat ini yang marak diperbincangkan adalah mengenai agama. Globalisasi mendorong agama menembus lintas batas dengan

[86] https://m.detik.com>news.kolom, *Pilpres 2019 dan Dua Narasi Islam*-Detik News, (Dikutip pada Sabtu, 22 Juni 2019, pukul 09:32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet sebagai pemicu perpaduan antara agama dan internet.[87] Dewasa ini internet menjelma menjadi "corong"nya Tuhan.[88] Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya alat teknologi sebagai alat untuk membantu komunikasi, maka tak jarang bahwa orang-orang bisa belajar agama secara otodidak dengan cara melihat video yang disebarkan melalui media sosial. Orang-orang bahkan anak-anak bisa mendengarkan maupun melihat ceramah ataupun kultum di media sosial dengan cara mudah.

Tantangan warga Indonesia saat ini adalah tentang agama dan globalisasi, di mana agama tidak hanya satu aliran saja, seperti agama Islam, Islam mempunyai berbagai macam aliran seperti, Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, LDII, Wahabi, dan sebagainya. saat ini ceramah dari para ulama' terkemuka di Indonesia sering melakukan siarannya melalui televisi, radio bahkan di media sosial yang bisa secara mudah diakses oleh warga Indonesia. Generasi milenial pada saa ini memang mudah terpengaruh oleh berita maupun konten yang disebarkan di media sosial.

Dengan adanya jaringan internet yang berkembang semakin pesat, maka memungkinkan berlangsungnya forum dan debat yang kemudian mengizinkan ide-ide religius tersebut menyebar dan berkembang pesat[89] ke seluruh warganet. Tidak hanya itu, dengan adanya jejaring sosial yang memadai, maka jika dilihat tak jarang juga seseorang yang tadinya menganut agama yang Islam

[87] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS: 2017), 21.
[88] Ibid,
[89] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang biasa saja lalu menjadi seseorang yang fanatik terhadap agama. Hal itu juga berpengaruh terhadap kepribadiaan seseorang.

Diskusi yang bertajuk "Pancasila 1 Juni dan syari'at Islam" telah menjadi sebuah diskusi yang sangat penting dan konstektual diselenggarakan oleh Megawati Institute pada Agustus 2011. Megawati Institute adalah lembaga think tank yang fokus pada ideologi kerja (*working ideology*) Pancasila 1 Juni 1945 dan 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan menghubungkan pemikiran cendekiawan[90]. Diskusi tersebut diliput oleh beberapa media massa dari berbagai stasiun televisi.

Dari diskusi tersebut hal tersebut sangat menarik untuk disikusikan karena tak hanya memotret sikap kelompok-kelompok islamis mengenai dasar negara namun juga memperlihatkan perubahan strategi dalam meletakkan syari'at Islam di bingkai Pancasila, sekaligus sejumlah problematika yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sudah bisa dilihat dari sini bahwa ini merupakan sinyal adanya problem mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara.[91]

Pergulatan Pancasila dari masa ke masa memang menuai kontroversi mulai dari perencanaan Pancasila, peresmian Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia hingga saat ini kontroversi mengenai Pancasila tidak ada habisnya. Mengutip dari buku yang berjudul intoleransi karya Alamsyah M. Dja'far pembagian sejarawan Asvi Warman Adam misalnya, pergulatan

[90] Alamsyah M. Dja'far, Intoleransi*; Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 1-2.
[91] Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pancasila itu dibagi dalam empat tahap.[92] *Pertama*, gelombang peresmian Pancasila dimulai pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI menjawab pertanyaan sidang Radjiman Wedyodiningrat. Selanjutnya pada 22 Juni 1945 kelompok sembilan tokoh yang diprakarsai oleh Ir. Soekarno memasukkan tujuh kata yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" kalimat itu ada pada sila pertama, akan tetapi pada saat disahkan pada 18 Agustus 1945, atas pendapat Muhammad Hatta, tujuh kata pada sila pertama itu dihapus.

Tahap selanjutnya tahap *kedua* perdebatan yang dimulai dengan pembentukan konstituante pasca pemilu 1955 yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Konstituante terbelah menjadi dua kelompok, M. Natsir dan Hamka yang mewakili fraksi Islam mengajukan Islam sebagai pilihan sedangkan yang mempertahankan Pancasila adalah partai-partai komunis dan nasionalis. Dari situ tidak ada yang mencapai 2/3 jumlah suara. Pada peristiwa tersebut Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pembubaran pada 5 Juli 1959 dan pada 18 Agustus 1945 UUD 1945 kembali disahkan yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno.[93]

Tahap yang *ketiga* ialah rekayasa di masa Soeharto. Pada masa ini Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal untuk organisasi kemasyarakatan dan Partai politik. Pada 13 Juni dikeluarkanlah rumusan resmi Pancasila oleh keputusan presiden. Pada tahun 1968 laboratorium Pancasila didirikan di Malang. Selang tiga tahun selanjutnya diterbitkan bersamaan dengan dokumen

[92] Ibid,,
[93] Alamsyah M. Dja'far, *Intoleransi; Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berisi sikap ABRI tentang Pancasila. Ideologi disosialisasikan melalui P4 yakni pedoman, penghayatan, dan Pengamalan Pancasila.[94]

Tahap yang terakhir ialah tahap *keempat* penemuan kembali. Tahap ini dimulai pada saat reformasi. Pada masa ini P4 dihapus. Pada masa ini Pancasila terus menuai kontroversi. Sejumlah masalah yang terus mendera Indonesia ancaman disintegrasi bangsa saat ini menjadi sebuah problematika yang tidak mudah karena banyak gerakan yang ingin berusaha menggeser Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Ismail Yusanto selaku juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia melontarkan bahwa Pancasila dinilai ideal sebagai seperangkat gagasan filosofis akan tetapi tidak mencukupi untuk mengatur masyarakat Indonesia. Kata Ismail Yusanto, dalam praktiknya, Pancasila selalui dimaknai sebagai "selera" penguasa.

Belakangan ini di media sosial sering muncul perdebatan ideologi dikarenakan sentimen keagamaan kembali dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan kelompok-kelompok yang ambisi untuk membangkitkan impian lama tentang berdirinya sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran agama. Hal ini bisa dipandang dari berbagai aspek misalnya seperti pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front pembela Islam (FPI) memunculkan kesan aspirasi memasukkan kata syari'at Islam dalam Pancasila. Aspirasi syari'at Islam dalam hal ini tampaknya semakin menuai kontroversi. Sejauh persoalan yang paling mendasar seperti masalah lemahnya penegakan hukum, hukum di Indonesia ini bagaikan tumpul di atas dan tajam ke bawah, masalah

[94] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krisis ekonomi, dan sebagainya. Hal ini akan tetap terus dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan eskalasinya akan meningkat apabila kesenjangan dan problem-problem itu semakin meluas.[95]

[95] Alamsyah M. Dja'far, *Intoleransi; Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DALAM KONTROVERSI IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM VERSUS PANCASILA DI MEDIA SOSIAL

A. Awal Munculnya Perdebatan Ideologi Khilafah Islam Versus Pancasila

Perumusan pancasila berawal dari piagam Jakarta pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya-pemeluknya." Setelah ada usulan dari beberapa tokoh yang beragama non muslim mengungkapkan bahwasannya negara Indonesia adalah negara majemuk yang artinya mempunyai berbagai macam suku. Budaya, adat, dan agama maka dari itu, tujuh kata pada sila pertama pada Pancasila dihapuskan akhirnya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada sila pertama Pancasila sudah final dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Meskipun Pancasila sudah final sebagai dasar negara Indonesia akan tetapi masih ada kelompok yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara agama dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Pengaruh globalisasi yang berdampak pada kemajuan teknologi mengakibatkan yang menyediakan website dan situs resmi informasi tentang keagamaan terutama dalam hal agama Islam.[96] Saat ini jika ingin mengetahui informasi tentang agama semakin mudah untuk diakses karena pengaruh dari globalisasi.

[96] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia memiliki empat pilar negara yaitu Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yang termasuk konsensus kebangsaan yang final. Namun selama reformasi isu tentang perdebatan ideologi semakin menjadi-jadi. Atas kehadiran wacana dan gerakan negara Islam sebagai aksi ideologi politik yang terpendam yang mengakibatkan kesan kuat bahwa negara Islam versus negara Pancasila belum terselesaikan hingga saat ini.[97]

Bisa dilihat dengan adanya partai politik saat ini yang berbasis agama, seperti PKS, PAN, PBB, PPP. Partai politik yang berbasis Islam saat ini muncul semakin pesat karena adanya kebangkitan Islam di Indonesia. PBB muncul sebagai partai politik yang tidak bisa diremehkan. Pada pemilihan legislatif tahun 2004, partai politik berbasis Islam mendapatkan suara sekitar 35%, sedangkan PKS memperoleh suara terbanyak sebagai partai politik Islam. Meskipun sempat menurun pada tahun 2009 memperoleh 29% suara akan tetapi partai politik berbasis Islam naik menjadi 31% pada saat pilihan legislatif 2014.[98]

Tahun 2019 adalah tahunnya pesta rakyat dan pesta demokrasi. Dari sinilah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif dilaksanakan pada bulan April 2019. Sebelum pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden dimulai. Semua pendukung partai politik memberikan suara haknya kepada masyarakat Indonesia. Mereka ingin melakukan kampanye di tengah-tengah masyarakat

[97] Zakiyuddin Baidhawi, "Negara Pancasila Negara Syari'ah", *Jurnal Ma'arif*, Vol. 10, No. 1, (Agustus 2015), 42.
[98] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Bisa dilihat dari cara mereka berkempanye antara kubu oposisi dan petahana sangat berbeda. Mereka melakukan kampanye dengan tema dua narasi Islam yang berbeda. Dari kubu oposisi mengusung tema Islam konservatif-ideologi sedangkan kubu petahana mengusung tema Islam moderat-kultural.

Pemilihan presiden tahun 2019 ini memang berbeda dari pemilihan presiden sebelum-sebelumnya karena mempertaruhkan pertarungan dua ideologi Pancasila ada pada satu pihak dan ideologi Khilafah Islam dipihak lain.[99] Hal ini yang membuat para *netizen* dan warganet sangat antusias untuk mengetahui informasi tersebut yang sudah menyebar luas di media sosial seperti instagram, facebook, terutama di twitter. Dua narasi Islam yang berbeda menjadi perbincangan hangat dan menjadi berita viral di media sosial. Masyarakat Indonesia khususnya pada generasi saat ini yakni generasi milenial ada yang pro dan kontra atas berita yang telah menjadi *trending topic* di tahun ini.

Dalam berita yang sempat menjadi viral dan menjadi berita hangat di beberapa stasiun televisi dan media sosial khususnya pada media sosial twitter yang sangat mudah dikomentari oleh kalangan generasi milenial saat ini. Bagaimanapun juga setiap ada pemilihan kursi kekuasaan selalu ada isu tersendiri yang dimainkan oleh beberapa partai politik yang mengusung

[99] https://www.persis.or.id, *Bola Panas Khilafah Islam vs Pancasila*, (Dipublish pada 03 April 2019, Pukul 22:56 WIB), (Dikutip pada hari Sabtu, 06 Juli 2019, Pukul 10:40).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing kubu tersebut[100] untuk melakukan hak suaranya supaya bisa menjadi pilihan rakyat Indonesia.

Bagaimanapun juga agama saat ini tidak bisa hilang dari perbincangan partai politik karena apabila agama dihubungkan dengan partai politik dan sistem pemerintahan pasti tidak akan ada yang bisa menolak karena kedudukan agama memang menduduki posisi paling atas. Karena agama mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi ada fenomena saat seorang anggota DPRD dari fraksi PPP yang mengatakan bahwa dengan membawa konsep syari'at Islam diterapkan secara utuh apabila negara memberi peluang untuk menjadikan sistem negara sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi beberapa kelompok menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan syari'at Islam di negara Indonesia apalagi sampai mengambil ahli hukum negara.[101]

Dua narasi Islam yang berbeda yakni pihak pertama adalah mengusung tema Islam moderat-kultural sedangkan pihak kedua mengusung tema Islam konservatif-ideologi yang saat ini menjadi permainan untuk mendongkrak suara. Namun ketika paradoks Khilafah Islam versus Pancasila dimainkan[102] dalam pemilihan umum akhir-akhir ini ada beberapa hal yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum menjadi perselisihan diantara pendukung partai politik oposisi maupun petahana.

---

[100] Ibid,

[101] Dalmeri, "Prospek Demokrasi: Dilema Antara Penerapan Syari'at Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Salam; Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2012), 234.

[102] https://www.persis.or.id, *Bola Panas Khilafah vs Pancasila*, (Dipublish pada 03 April 2019 Pukul 22:56 WIB), (Dikutip pada hari Sabtu, 06 Juli 2019, Pukul 10:50).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Khilafah Islam

Khilafah adalah sistem politik yang lahir dengan latar belakang kesukuan yang sangat kental.[103] Kekentalan semangat kesukuan ini dicairkan dalam bentuk politik yang berawal di saat Nabi Muhammad SAW diutus. Khilafah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sistem politik yang yang didasarkan pada semangat menjadikan suku, bukan sebagai akhir dari sistem politik akan tetapi awal dari perjalanan pengabdian untuk masyarakat yang lebih luas. Sedangkan semangat Khilafah yang ingin ditegakkan saat ini masih sangat banyak bertumpu pada sistem Khilafah yang sudah dikooptasi semangat kesukuan daripada anti kesukuan.[104] Sangat berbeda pada zaman Rasulullah SAW. Dari dulu hingga saat ini Khilafah Islam menjadi sebuah fenomena yang perlu dikaji lagi karena ideologi Khilafah Islam dianggap sebagai insabilitas politik, sebab rezim-rezim otoriter memakai undang-undang darurat untuk membungkam gerakan mereka. Bahkan rezim-rezim otoriter melarang aktivis mereka dengan dalih bagian dari gerakan teroris yang biasa terkenal dengan nama *Al-Qaeda*.[105]

Suara kelompok yang mendengungkan Khilafah Islam di Indonesia adalah suatu solusi yang baik apabila Khilafah Islam menjadi sistem politik di Indonesia. Bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah Islam adalah

---

[103] Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah; Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2014), 19.
[104] Ibid,
[105] Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah; Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2014), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah solusi yang membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia, mereka meyakini bahwa dengan ditegakkannya Khilafah Islam di Indonesia adalah sebuah jawaban dari persoalan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ketiadaan Khilafah Islam akan berdampak pada tiga masalah utama yang harus dihadapi oleh umat Islam saat ini yakni pertama kehilangan kepemimpinan umum di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam mudah terpecah belah. Kedua, umat dipandang akan susah menjalankan penegakan hukum agama secara menyeluruh (*kaffah*) yang bisa karena tidak adanya institusi legal sebagai eksekutor (Khilafah), dan yang ketiga ialah tanpa adanya Khilafah umat Islam akan lalai dalam menjalankan perintah utamanya, yakni berdakwah ke seluruh penjuru dunia.[106]

Gerakan Khilafah Islamiyah ini sudah terjadi sejak tahun 90-an hingga saat ini. Mereka berpendapat bahwa ditegakkannya Khilafah Islam di Indonesia dengan pemimpin yang disebut Khalifah maka akan menjadikan pemerintahan ini adil dan sejahtera karena mereka menganggap bahwa Khalifah adalah wakil Allah yang diturunkan ke bumi untuk memimpin seluruh penjuru dunia. Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin mendirikan sistem Khilafah Islam adalah untuk menyampaikan kebebasan dalam berpendapat pada ranah pemerintahan bernegara.[107]

Khilafah adalah sistem politik dari ideologi Islam yang mewadahi aturan hukum, representatif, pemerintah, dan akuntabilitas masyarakat melalui

[106] Mohammad Mahfud MD, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 138.
[107] Baidhowi, "Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2016), 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahkamah independen, dan prinsip konsultasi representatif. Pemerintahan ini dibangun di atas konsep kewarganegaraan tanpa memandang gender, etnis, dan menentang perlakuan represif terhadap kelompok etnis maupun religius.[108]

Pembahasan mengenai Khilafah Islam sangatlah luas. Mulai dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini sering dibicarakan ingin menegakkan Khilafah Islam di Indonesia, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syriah*), dan NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah).[109] Kelompok tersebut adalah kelompok yang mengusung ideologi Khilafah dan syari'at. Dari beberapa kelompok yang sudah ditulis oleh peneliti diatas adalah negara-negara Iraq dan Suriah adalah negara yang saat ini ada peristiwa konflik di sana hingga menyebabkan ribuan umat Islam dan anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban.

Gerakan-gerakan pengusung ideologi Khilafah dan syari'at Islam adalah gerakan yang pada hakikatnya memiliki pikiran untuk menjadikan Islam sebagai justifikasi kekuasaan dengan menggunakan diskriminasi dan kekerasan. Dari sini bisa diteliti lagi bahwa gerakan-gerakan yang mengusung ideologi Khilafah dan syari'at Islam perlu difiltrasi lagi bahwa gerakan tersebut tidak hanya mengatasnamakan agama Islam dan unsur-unsur Islam sebagai sistem pemerintahan melainkan gerakan politik yang syarat dengan agenda-agenda politik kekuasaan.[110]

---

[108] Idil Akbar, "Khilafah Islamiyah : Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, (April 2017) 97.
[109] Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah; Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2014), 70.
[110] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila

Apabila dilihat dari negara Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai berbagai macam agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Indonesia saat ini mempunyai 6 (enam) agama yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang dasar yakni, Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari sini banyak masyarakat Indonesia yang kontra jika Khilafah Islam ditegakkan di Indonesia. Khilafah Islam lebih cocok jika dijadikan sebagai sistem pemerintahan di negara-negara yang berbasis Islam seperti di negara Timur Tengah pada umunya.

Indonesia merupakan negara hukum Pancasila seperti yang tercantum pada konstitusi negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 No. 3 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan secara jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang pasti memiliki konsekuensi yuridis yang wajib dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.[111]

Menurut pemikiran peneliti dari sila-sila yang ada pada Pancasila memang mempunyai peran penting yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai keagamaan yang ada pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" agama yang diakui oleh negara dilindungi dan mendapatkan posisi paling atas. Pada sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yakni nilai hak asasi manusia. Dalam hukum di Indonesia, terdapat Komnasham singkatan

[111] Muhammad Arif Khudori, "Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Skripsi Raden Intan Lampung*, (2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melindungi masyarakat Indonesia yang tidak bersalah dan memberikan sanksi bagi yang melakukan kesalahan. Sila ketiga yaitu "persatuan Indonesia" nilai yang terkandung di dalamnya mengandung nilai bersatu. Sesama warga negara Indonesia harusnya saling bersatu untuk membangun negeri yang sejahtera, aman, dan damai. Sila ke empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan" yang mempunyai arti kepemimpinan Indonesia untuk memimpin rakyat sesuai dengan negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakayat, dan untuk rakyat. Sila kelima ialah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki nilai keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia bukanlah negara Teokrasi, akan tetapi Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi agama. Indonesia juga melindungi semua agama-agama yang diakui oleh negara maka dari itu kedudukan agama Islam juga mendapat tempat yang paling terhormat dan dilindungi seperti yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.[112]

Pancasila mempunyai posisi penting di Indonesia yakni sebagai ideologi negara dan yang kedua sebagai dasar negara, yang dimaksud sebagai dasar negara adalah filasafat dasar negara. Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno menyebutnya *Philosophisce Groslag*.[113]

---

[112] Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, (2015), 200.
[113] Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi; Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai posisi sebagai landasan filsafat hukum. Teks Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah fundamental negara yang memiliki kekuatan *grundnorm*.[114]

Presiden Indonesia yang ke-empat yakni K.H. Abdur Rahman Wachid (Gus Dur) memiliki peran penting atas Pancasila karena beliau menemukan ranah strategisnya pada dua hal yakni Pancasila dan demokrasi. Visi humanistik dalam Pancasila dari keislaman menemukan titik temu normatifnya sebab dasar negara ini menetapkan dasar-dasar kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur juga menemukan tata politik yang kemungkinan hak manusia dijaga secara normatif dan diwujudkan secara praksis.[115]

Gus Dur juga menyatakan bahwa "Kaum muslimin menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan aqidah dijadikan Islam sebagai kehidupan kaum muslim. Agama tidak memperdebatkan ideologi konstitusional, tidak menjadi penggantinya, serta tidak diberlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan Undang-Undang ataupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.[116]

Pemerintahan yang berdasarkan dengan Pancasila sudah menjadi dasar negara yang final dan tidak bisa diganti lagi karena sudah dijelakan di

---

[114] Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi; Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 15.
[115] Ibid, 89.
[116] Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi; Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas oleh peneliti bahwasannya para pendiri bangsa (*founding father*) sudah merumuskan Pancasila dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

D. Kontroversi Khilafah Islam Versus Pancasila di Media Sosial Perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Model analisis Norman Fairclough didasarkan pada bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro.[117] Suatu model analisis wacana kritis yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial maupun budaya pemikiran inilah yang dibangun oleh Norman Fairclough. Ia menggabungkan tradisi analisis tekstual yang melihat bahwa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fairclough mengamati bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu.[118] bahasa secara sosial dan kritis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Maka dari itu harus dipisahkan pada bagian bahasa terbentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.[119]

Ada empat langkah metode analisis wacana kritis Fairclouh. *Pertama*, memfokuskan ketidakberesan sosial pada aspek semiotiknya. *Kedua*, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial itu. *Ketiga*, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut. *Keempat* ialah

[117] Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiprespektif*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 126.
[118] Ibid, 127.
[119] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasikan cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.[120]

1. Memfokuskan Pada Aspek Semiotiknya

Langkah pertama yang ditawarkan oleh Fairclough adalah memfokuskan pada aspek semiotik. Semiotik di sini adalah mengacu pada lisan, tulisan, dan visual. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada tulisan yang terdapat di postingan status maupun komentar yang ada di media sosial khususnya facebook dan twitter. Pada postingan-postingan yang diunggah oleh para pengguna media sosial kuhusunya media sosial facebook dan twitter banyak yang mengunggah tulisan atau postingan mengenai Khilafah Islam versus Pancasila.

Ada juga yang beranggapan bahwa dua ideologi tersebut dijadikan sebagai tema dalam pilpres tahun 2019 ini karena banyak yang beranggapan bahwa tema pilpres pada tahun 2019 adalah bertemakan dua narasi Islam yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa kubu petahana mengusung tema Islam moderat-kultural dikarenakan mereka saat kampanye menghadiri acara muktamar NU dan mendatangi beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' yang selama ini identik dengan organisasi masyarakat yang bercorak kultural Indonesia. Hal ini juga bisa dilihat bahwa kubu petahana menghadiri acara dalam rangka memperingati hari lahir muslimat sayap organisasi keperempuan NU yang diadakan di Gelora Bung Karno beberapa bulan yang lalu. Sedangkan ada yang

[120] Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2017), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan pada kubu oposisi bahwa kubu ini mengusung tema konservatif-ideologi dikarenakan mereka datang pada acara reuni 212 bulan lalu.

2. Mengidentifikasi Hambatan-Hambatan Untuk Menangani Ketidakberesan Sosial

   Teori ini membahas mengenai wacana tentang sosio-politik bisa juga menghubungkan antara agama dan politik. Penulis menghubungkan antara Khilafah Islam dan Pancasila. Saat ini agama dan ideologi bisa dijadikan alat sebagai pendukung pada bidang politik karena banyak yang beranggapan bahwa pilpres tahun ini bertemakan dua narasi Islam yang berbeda antara moderat-kultural dan konservatif-ideologis

3. Mempertimbangkan Apakah Tatanan Sosial Itu Membutuhkan Ketidakberesan Sosial

   Perdebatan antara Khilafah Islam dan Pancasila yang terjadi saat ini sudah meluas di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, di berbagai media sosial pun juga sudah meluas khususnya bagi kalangan generasi muda atau generasi milenial saat ini. Banyak yang memposting tulisan maupun komentar tentang HTI, Khilafah, negara Indonesia dihubungkan dengan politik. Hal ini menyebabkan perdebatan di media sosial karena di satu sisi ada yang mendukung Khilafah dan di sisi lain ada yang mendukung NKRI. Hal ini menjadikan sebuah konflik sosial karena hal sepele bisa menjadikan bangsa ini terpecah belah. Penggunaan media

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang sebenarnya adalah untuk menjadikan komunikasi dan sebagai ajang pencarian teman bukan mencari lawan.

4. Mengidentifikasi Cara-Cara yang Mungkin Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan

Langkah yang terakhir adalah pemecahan masalah dalam konflik perdebatan ideologi di kalangan generasi milenial melalui media sosial. Untuk saat ini adalah mengajari pendidikan moral kepada anak-anak sejak usia dini karena banyak yang berakal sehat akan tetapi moral masih minim. Saat ini yang terpenting adalah pendidikan moral yang ditanam kepada anak-anak karena jika pendidikan moral diajarkan kepada anak sejak dini akan berpengaruh pada pertumbuhannya kelak jika sudah dewasa. Penggunaan teknologi pada anak-anak juga sebaiknya dibatasi karena usia muda sangat rentan dan labil maka dari itu tak jarang anak-anak muda saat ini banyak yang salah kaprah dalam menggunakan media sosial. Sebagai anak muda penerus generasi bangsa sebaiknya belajar yang rajin karena memang waktu muda adalah waktu di mana otak masih segar dan badan masih bugar dibanding dengan yang tua. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa marilah anak-anak muda atau generasi milenial saat ini teruslah belajar jangan sampai merasakan lelah dalam belajar karena impian bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda saat ini yang bisa mencetak prestasi anak bangsa.

Fairclough membuat model analisis wacana kritis yang mengintegrasikan secara bersamaan dalam menganalisis wacana perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang mengintegrasikan secara umum pada linguistik, pemahaman sosial, dan politik yang didasarkan pada linguistik.[121] Titik perhatian ini dipusatkan pada bahasa sebagai praktik kekuasaan dan sebagai praktik sosial oleh karena itu wacana dianggap sebagai bentuk dari tindakan.[122]

Dalam kaitan ini, wacana terdiri atas sruktur sosial, kelas, dan kelompok sosial yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu seperti pada hukum dan pendidikan, sistem, dan klasifikasi.[123]

Analisis wacana kritis yang dibawakan oleh Fairclough ada tiga dimensi, diataranya teks, *discourspractice*, dan *sosiocultural practice*.[124]

Peneliti akan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough dalam menanggapi kontroversi ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di media sosial yang kebanyakan berkomentar di media sosial adalah para generasi muda (milenial). Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Fairclough yang ketiga yaitu, *sociocultural practice*, merupakan dimensi yang berkaitan dengan konteks diluar naskah. Dalam konteks ini memasukkan segala hal seperti konteks situasi, dan yang lebih luas lagi adalah konteks dari praktik institusi melalui media sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan politik tertentu. contohnya seperti politik

---

[121] Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis; Dalam Multiprespektif*, (Bandung, Refika ditama 2014), 158.
[122] Ibid,
[123] Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis; Dalam Multiprespektif*, (Bandung, Refika ditama 2014), 158.
[124] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media, ekonomi media, atau budaya media tertentu yang dapat berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya.[125] Seperi pada gambar di bawah ini

Gambar 1.3

[125] Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis; Dalam Multiperspektif*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.4

Sumber gambar: Facebook

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.6 Gambar 1.7

E Sumber gambar: Chirpstory peneliti cantumkan di atas adalah dari media sosial facebook dan chirpstory dimana pada saat itu kontroversi tentang Khilafah Islam versus Pancasila menjadi berita viral yang artinya berita terhangat diperbincangkan pada saat ini.

Dari komentar-komentar para generasi milenial dan para pengguna media sosial sebaiknya menggunakan komentar yang cerdas dan masuk akal agar bisa diterima dengan jelas bagi semua pengguna media sosial. Dari gambar di atas peneliti tekankan bahwa berkomentar di media sosial saat ini ada peraturannya tersendiri seperti pada Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) yang terdapat pada pasal 45A ayat 2: *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*[126]

Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain antara Khilafah Islam versus Pancasila. Khilafah Islam sudah ada sejak zaman pemerintahan Rasulullah dan telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Maidah ayat: 48

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

[126] UU ITE, Pasal 45A ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Maka Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada."*

Atas firman Allah SWT di atas, Hizbut Tahrir Indonesia sangat yakin bahwa Khilafah Islam sangatlah dianjurkan sebagai sistem pemerintahan pada suatu Negara. Maka dari itu Hizbut Tahrir Indonesia sangat antusias untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia.

Firman Allah SWT juga ada untuk Pancasila seperti pada QS. Asy-Syuraa ayat: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami bagikan kepada mereka."*

Dari firman Allah di atas sudah dijelaskan bahwasannya Pancasila memang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena Pancasila merupakan hasil musyawarah dari para pejuang tokoh kemerdekaan Indonesia (*Founding Father*). Agama Islam sangat mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia karena telah menyelesaikan sebuah masalah dengan cara bermusyawarah.[127]

Antara Khilafah Islam versus Pancasila tidak ada yang salah. Pendapat orang-orang memang boleh berbeda akan tetapi jangan mengedepankan ego masing-masing hanya untuk kepentingan individu karena hidup di dunia ini tidaklah sendirian melainkan secara kelompok. Menurut Ali Abdul Raziq, agama

[127] Muhammad Arif Khudori, "Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI", (Skripsi Raden Intan Lampung), (2018), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk memilih sistem pemerintahan apapun yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dengan catatan penting, tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Maka dari itu janganlah cepat berselisih dengan sesama saudara terutama dengan sesama saudara muslim dan janganlah cepat untuk menelan mentah-mentah berita yang belum pasti kebenarannya karena mungkin ada beberapa orang yang ingin memecah belah persatuan Indonesia dan umat muslim, maka dari itu penulis menganjurkan untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Paling penting untuk saat ini adalah persatuan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari setiap bab yang telah dianalisis maka hasil dari kesimpulan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan dari rumusan masalah faktor terjadinya perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di kalangan generasi milenial melalui media sosial adalah karena sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi, namun tidak sesering dibicarakan seperti saat ini yang menjadi berita hangat. Awal dari perdebatan ideologi adalah karena dahulu ketika perumusan Pancasila yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, pada sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari'at-syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Akan tetapi pada sila pertama membuat para non muslim khususnya Indonesia bagian timur keberatan karena pada sila pertama seakan-akan memperhatikan agama Islam di Indonesia. Karena melihat negara Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai macam adat, suku, budaya, agama dan ras. Alhasil setelah diadakannya musyawarah dan rapat yang panjang untuk meresmikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadilan Pancasila dengan sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga "Persatuan Indonesia, sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan sila kelima "Keadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara yang final dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalamnya serta tidak boleh ada yang boleh mengubahnya apalagi menggantinya.

Tantangan Indonesia ada di era globalisasi di mana agama menjadi berbagai macam paham dan doktrin. Hal ini bisa dilihat dari agama Islam di Indonesia. Agama Islam di Indonesia terkenal dengan agama Islam yang moderat artinya menghargai sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda agama. Namun, untuk saat ini agama Islam di Indonesia semakin banyak yang fanatik dengan agama Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist menjadi pedoman untuk berbangsa dan beragama. Karena semakin banyak orang yang tahu betul tentang agama namun tidak tahu bagaimana caranya hidup di Indonesia, banyak yang mengerti tentang agama, seakan-akan dirinya yang paling benar dan orang lain salah akhirnya menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Hal ini bisa dilihat dari ada beberapa orang yang ingin menggeser Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena tidak sesuai dengan syari'at Islam. Serta banyak yang berpendapat bahwa pesta demokrasi tahun ini adalah dua narasi Islam yang berbeda, kubu petahana yang paham moderat-kultural, sedangkan kubu oposisi paham ideologis-konservatif sehingga menjadi Khilafah Islam versus Pancasila.

Kedua, dari rumusan masalah yang kedua, muatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila di media sosial ada beberapa media sosial yang membicarakan tentang Khilafah Islam versus Pancasila, khususnya di media sosial twitter. Banyak para pemuda yang berkomentar yang dinilai kurang berkenan dan akan menimbulkan sakit hati bagi yang merasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *netizen* pun geram jika membaca komentar-komentar yang dianggap kurang sopan karena mereka yang berkomentar kebanyakan dari kalangan generasi milenial, dimana tugas mereka adalah belajar supaya bisa menjadi penerus bangsa yang bijaksana yang tidak mudah terbawa emosi.

Ketiga, dari rumusan masalah yang ketiga, alur perdebatan ideologi Khilafah Islam versus Pancasila secara filosofis adalah Khilafah Islam dan Pancasila sama-sama mempunyai landasan filosofis. Landasan filosofis dari Khilafah Islam adalah pemikiran Hizb al-Tahrir dalam memandang pemimpin dan pengikut-pengikutnya adalah hasil dari pemikiran yang mendalam yang tercerahkan. Karena hasil dari pemikiran mereka tentang Khilafah sebagai ideologi pemerintahan Islam merupakan pikiran yang tercerahkan. Untuk membuktikan hal itu bisa dilihat pada kitab yang berisis *truth claim* terhadap hasil karya-karya pendiri Khilafah. Pancasila juga merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam para pejuang kemerdekaan Indonesia khususnya Bapak pendiri bangsa yang dikenal dengan (*Founding Father*). Dari kelima sila pada Pancasila merupakan ide dan hasil dari perenungan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa untuk mewujudkan Indonesia merdeka, adil, dan makmur. Para tokoh melihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mengakui kemajemukan dalam segala aspek baik dilihat dari agama, ras, suku, maupun budaya. Maka dari itu Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara yang yang menghargai keberagaman suku, budaya dan adat, maka dicetuskanlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa pada Pancasila terdapat sila-sila yang di dalamnya mengandung sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai syari'ah seperti pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini telah menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya agama.

B. Saran

Sebagai kelanjutan penelitian ini di tahun yang akan mendatang supaya bisa bermanfaat terhadap dunia akademisi khususnya pada kajian filsafat di UIN Sunan Ampel Surabaya, maka penulis akan memberikan saran diantaranya yaitu:

1. Berita yang terdapat pada media sosial khususnya twitter janganlah langsung ditelan mentah-mentah, karena pada era ini, banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (*hoax*). Seperti berita yang sempat menjadi hangat diperbincangkan yakni Khilafah Islam versus Pancasila pada beberapa bulan yang lalu adalah pesta demokrasi. Para pendukung petahana memberikan sindiran pada kubu oposisi, pendukung oposisi juga begitu memberikan sindiran pada kubu petahana. Sindiran tersebut terdapat pada beberapa media sosial dengan komentar-komentar yang kurang berkenan jika dibaca. Tidak hanya itu saja, Khilafah dan Pancasila pun turut menjadi perbincangan hangat karena beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kubu oposisi menggunakan paham konservatif-ideologi, sedangkan kubu petahana menggunakan paham moderat-kultural pada kampenya masing-masing partai politik pendukung mereka. Akhirnya ideologi yang seharusnya dijaga dengan baik dan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara menjadi sebuah kontroversi. Dari sini lah peneliti bisa melihat bahwa kurangnya nilai etika dan kebjaksanaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggapi sebuah berita yang kemungkinan menjadi konflik di Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting edukasi dan bimbingan para orangtua kepada anaknya dan para guru kepada murid-muridnya. Penggunaan *smartphone* media sosial bagi anak-anak muda sebenarnya kurang dianjurkan karena anak-anak muda dinilai masih labil dalam menggunakan media sosial. Yang ditakutkan adalah mereka akan berdampak pada hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya rasa malas sehingga bisa membuat menurunya kecerdasan pada anak, serta berkomentar negatif pada media sosial. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang aktif perlu disaring sebelum *sharing*.

2. Dengan terselesaikannya penelitian ini yang telah disusun oleh penulis dalam bentuk skripsi, bukan berarti skripsi ini menjadi penelitian terakhir. Penulis mengharapkan sebuah penelitian lebih lanjut yang perlu didiskusikan lagi untuk pembahasan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Karena jika dilihat dari pemikiran analisis wacana kritis Norman Fairclouh ada 4 (empat) langkah yang ditawarkan oleh Fairclough untuk memberikan berbagai macam solusi guna menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aliah, Darma Yoce. *Analisis Wacana Kritis; dalam Multidisipliner*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Al Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Ar-Raziq, Ali Abd. *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Arif, Saiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi; Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Hardiman, Budi. *Kritik Ideologi*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Hidayat, Komaruddin. *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila, Jakarta: Mizan*, 2014.

Mahfud MD, Muhammad. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2017.

Mas'ud, Abdurrahman. *Negara Bangsa Vs Negara Syari'ah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

M. Dja'far, Alamsyah. *Intoleransi; Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Ms. Bakry, Noor. *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994.

Rofiq Al-Amin, Ainur. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq Al-Amin, Ainur. *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, Wahid Foundation, 2019.

Sa'fan, Kamil. *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam;Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq*, Kairo: Erlangga, 2006.

Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta: Bima Aksara, 1988.

Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1995.

2. Skripsi

Arif Khudori, Muhammad. "Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Ellyawati. "Khilafah Islamiyah dalam Pandangan Hizbut Tahrir". Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Hakim, Azrul. "Konsep Pemerintahan dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdur Raziq)". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Mastur. "Respon Mahasiswa Muslim UNY Terhadap Pemikiran Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Selly, Rosi. "Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

3. Jurnal

A. Meinarno, Eko, dkk. "Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)*, Vol. 1, No. 1, 2016, Depok: Universitas Indonesia, (Juni 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akbar, Idil. “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, (April 2017).

Arif, Syaiful. “Kontradiksi Pandangan HTI Atas Pancasila”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. II, No. 1, 2016, Jakarta: STAINU Jakarta, (2016).

Baidhawiy, Zakiyuddin. “Negara Pancasila Negara Syari’ah”, *Jurnal Maarif*, Vol. 10, No. 1, (Agustus 2015).

Baidhowi. “Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila”, Seminar Nasional Hukum, *Jurnal UNNES*, Vol. 2, No. 1, (2016).

Budiwibowo, Santrijo. “Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (April 2016).

Dahlan, Moh. “Eksistensi Negara Pancasila dalam Paradigma Ushul Fikih Progresif”, *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, (Februari 2013).

Dalmeri, “Prospek Demokrasi: Dilema Antara Penerapan Syari’at Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Salam; Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2012).

Hayati, Nilda. “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia; Kajian *Living Al-Qur’an* Perspektif Komunikasi”, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2017).

Hijroh Mukhlis, Febri. “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama”, *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No, 2, (2016).

Rafiuddin, Mohammad. “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rikza Muqtada, Muhammad. "Hadis Khilafah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017", *Mutawatir; Jurnal Keilmuwan Tafsir Hadis,*Vol. 8, Nomor. 1, 2018, Salatiga: IAIN Salatiga, (Juni 2018).

Rofiq Al-Amin, Ainur. "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Autokratik", *Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, Nomor. 2, (Desember 2017).

Supriadi, Cecep. "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, 2015, Gontor: UNIDA Gontor, (Maret 2015).

Utama Tanjung, Indra. "Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 1, 2018: Pasca Sarjana Panca Budi, (2018).

Ulya. "Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2016: STAIN Kudus, (2016).

4. Internet

https://chirpstory.com

https://guruppkn.com, *5 Urutan Lambang Garuda Pancasila dalam Simbol Budaya Indonesia*, (Dikutip pada Kamis, 27 Juni 2019, Pukul 19:31).

https://m.detik.com>news.kolom, *Pilpres 2019 dan Dua Narasi Islam*-Detik News, (Dikutip pada Sabtu, 22 Juni 2019, pukul 09:32).

https://m.facebook.com

https://mobile.twitter.com/.

htpps://www.kominfo.go.id, *Mengenal Generasi Millennial*, (Dikutip pada Senin 24 Juni 2019, pukul 21:10).

https://www.persis.or.id, *Bola Panas Khilafah vs Pancasila*, (Dipublish pada 03 April 2019 Pukul 22:56 WIB), (Dikutip pada hari Sabtu, 06 Juli 2019, Pukul 10:50).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://youtu.be/ma3mt2DU54Q.

Ravii Marwanidan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, ravii.staff.gunadarma.ac.id//publika... (Diakses pada hari Rabu, 14 Nopember 2018, pukul 08.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id